

**KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA**

**TESIS**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Dan Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD RUSYDIANSYAH**

**NPM. 7222800029**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

**KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA**

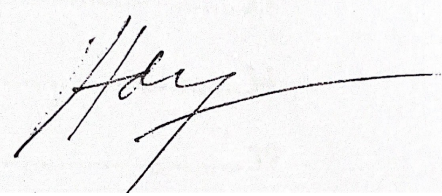
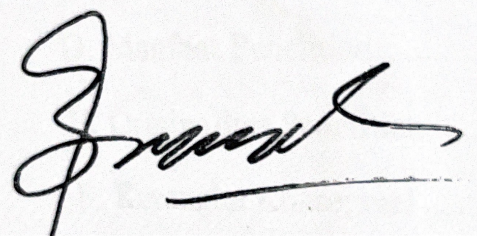
**MUHAMMAD RUSYDIANSYAH**

**NPM 7222800029**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, Agustus 2024

Pembimbing I Pembimbing II

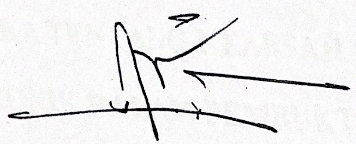
****

**Dr. Edhhie Praptono, SH., MH. Dr. Mukhidin, SH., MH.**

NIDK 8944550022 NIDN 0621076101

Mengetahui,

Ketua Program Studi



**Dr. Sanusi, SH., MH.**

**NIDN 0609086202**

##### PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia” karya:

Nama : Muhammad Rusydiyansyah

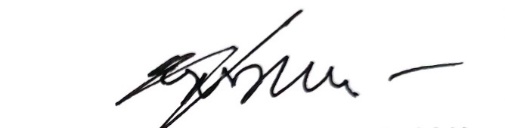
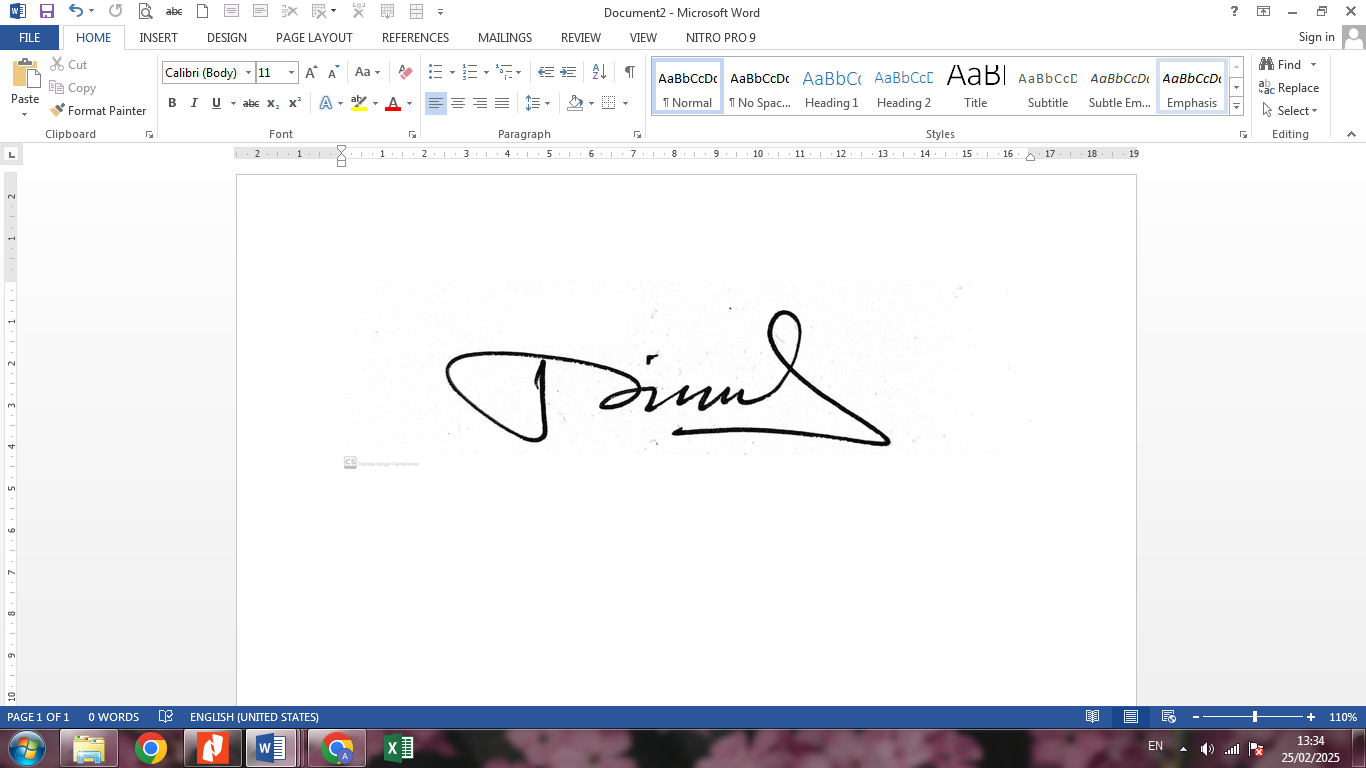
NPM : 7222800029

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

telah dipertahankan dalam sidang panitia ujian tesis Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025

Tegal, 19 Febuari 2025

Panitia Ujian

Ketua, Sekretaris,

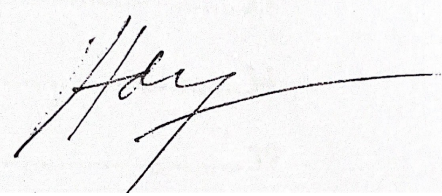
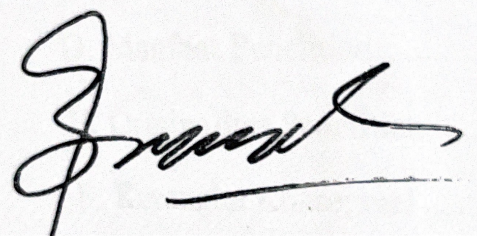
**Dr. Taufiqulloh, S.Pd., M.Hum Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H**

NIDN. 0615087802NIDN. 0606066001

Penguji Utama,

**Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H**

NIDN. 0617026101

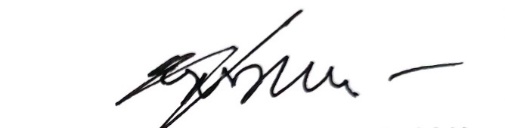
Penguji I,  Penguji II,

**Dr. Edhhie Praptono, SH., MH. Dr. Mukhidin.S.H.,M.H**

NIDK. 8944550022 NIDN. 0621076101



Mengetahui,

Direktur Pascasarjana, Ka. Prodi Magister Ilmu Hukum

**Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. Dr. Sanusi, S.H., M.H.**

NIDN. 0606066001 NIDN. 0609086202

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

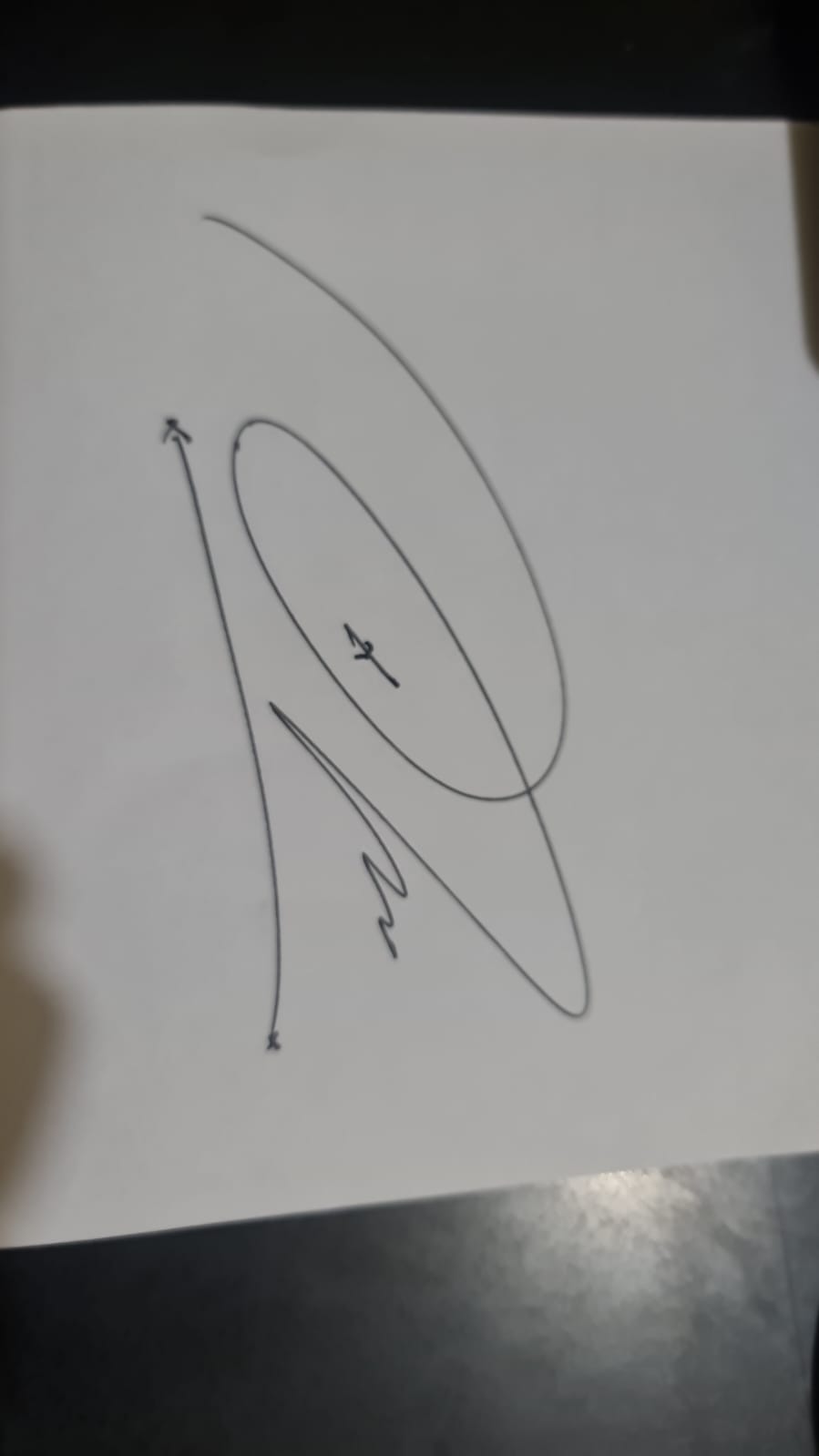
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rusydiyansyah

NPM : 7222800029

Jenjang : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Bila ternyata dikemudian hari diketahui ada yang tidak sesuai, maka saya siap menanggung akibatnya.

 Tegal, 19 Februari 2025

 Yang menyatakan,

Muhammad Rusydiansyah

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL i**

**HALAMAN PENGESAHAN ii**

**DAFTAR ISI iii**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 32

C. Tujuan Penelitian 33

D. Manfaat Penelitian 33

E. Originalitas Penelitian 34

F. Kerangka Konseptual 39

G. Kerangka Teoritik 40

H .Metode Penelitian 52

I. Rencana Sistematika Penulisan 55

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEABSAHAN TANDA**

**TANGAN ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN HUKUM**

**ACARA PERDATA INDONESIA 57**

1. Tinjauan Umum Tanda Tangan Elektronik 57
2. Pengertian Tanda Tangan Elektronik 57
3. Jenis-Jenis Tanda Tangan Elektronik 63
4. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik 67
5. Tanda tangan Konvensional 72
6. Tinjauan Umum Hukum Perdata 75
7. Pengertian Hukum Perdata 75
8. Karakteristik Hukum Perdata 82
9. Asas-Asas dan Unsur-Unsur Hukum Perdata 85
10. Sistematika Hukum Perdata 86

**BAB III METODE PENELITIAN 101**

1. Jenis Penelitian 101
2. Pendekatan Penelitian 102
3. Sumber Data Penelitian 104
4. Metode Pengumpulan Data 108
5. Metode Analisis Data 109

**BAB IV PEMBAHASAN 110**

1. Tanda Tangan Elektronik Pada Suatu Dokumen Elektronik Dapat Mempunyai Kekuatan Pembuktian Di Pengadilan 110
2. Prosedur Memperoleh Tanda Tangan Elektronik Yang Sah Dan Mempunyai Kekuatan Hukum 119

**BAB V PENUTUP 131**

1. Kesimplan 131
2. Saran 132

**DAFTAR PUSTAKA 134**

**ABSTRAK**

Tesis ini membahas keabsahan tanda tangan elektronik sebagai bukti dalam hukum perdata di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana tanda tangan elektronik dapat memiliki kekuatan hukum dan prosedur yang tepat untuk memperoleh tanda tangan elektronik yang sah. Fokus utama penelitian ini adalah pada aspek hukum terkait keabsahan tanda tangan elektronik dalam perjanjian perdata, serta prosedur yang harus dipenuhi agar tanda tangan elektronik dapat diakui sebagai bukti yang sah di pengadilan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan regulasi dan praktik hukum di Indonesia

Kata Kunci: Tanda Tangan Elektronik, Keabsahan, Bukti Hukum, Hukum Perdata, Indonesia, Prosedur Hukum

**ABSTRACT**

This thesis discusses the validity of electronic signatures as evidence in civil law in Indonesia. Using a normative legal research method, this study aims to identify how electronic signatures can have legal force and the correct procedures for obtaining a valid electronic signature. The main focus of this research is on the legal aspects of the validity of electronic signatures in civil agreements and the procedures that must be met for an electronic signature to be recognized as valid evidence in court. The findings of this research are expected to contribute to the development of regulations and legal practices in Indonesia.

Keywords: Electronic Signature, Validity, Legal Evidence, Civil Law, Indonesia, Legal Procedures.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Teknologi informasi berbasis computer mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Secara praktis, ini terjadi apabila system dirancang dengan sempurna bagi pengguna (users) yang memiliki pemahaman pengertian manajerial dan organisasi, dengan tujuan peningkatan efektivitas penggunaan. Masa depan adalah sekarang, saat terjadi perubahan yang pesat pada bidang teknologi informasi. Kemajuan dalam penerapan teknologi informasi seharusnya dapat menghasilkan keunggulan bagi orang-orang yang melaksanakan kegiatan. Adanya perubahan kondisi tugas atasan sehingga sebagai tugas seorang manajer dituntut untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Pada saat yang bersamaan, system mneyediakan informasi pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat sehingga memungkinkan untuk meningkatkan pengendalian. (Kasiyanto, 2015)

Aspek paling menarik dari revolusi digital adalah peran dari teknologi dalam mengubah masyarakat secara lebih baik atau posisitf. Perkembangan globalisasi yang ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi dan pengetahuan serta diikuti revolusi industry 4.0 telah mempengaruhi cara pandang manusia dalam bekerja dan menjalankan kehidupanya sehari-hari, yaitu kehidupan yang semakin terdigitalisasi. Era revolusi industry 4.0 juga mengajak masyarakat untuk memahami bahwa teknologi diciptakan untuk

memudahkan masyarakat itu sendiri, bukan untuk menambah masalah social dengan adanya fenomena disrupsi teknologi. (Idayanti, 2022)

Pada umumnya tanda tangan digital menggunakan teknik kriptografi kunci publik, kunci simetrik dan sebuah fungsi hash satu arah. Patut dicatat bahwa tanda tangan digital bukanlah tanda tangan dari seseorang yang di-scan ata dimasukkan ke computer menggunakan *stylus* atau mouse, tapi merupakan kumpulan dari kalkulasi-kalkulasi matematis untuk menyandikan data, yakni dengan *kriptografi*. Terminologi lain untukb*digital signature* adalah ‘*digitally* *ensured document’* agar maknanya tidak rancu. *Digital signature* dapat diibaratkan sebagai dokumen yang sudah ‘dikunci’ dan tidak bisa dimanipulasi isinya. Tanda tangan digital menggunakan kunci yang sama dalam melakukan enkripsi dan dekripsi terhadap suatu pesan (*message*). Pengirim dan penerima menggunakan kunci yang sama sehingga mereka harus menjaga kerahasian (*secrecy*) terhadap kunci tersebut.

Salah satu algoritma yang terkenal dalam *kripto grafisimetris* ini adalah Data *Encryption* standard (*DES*). *Public key crypthography*, atau dikenal juga sebagai *kriptografi simetris*, menggunakan dua kunci (*key*): satu kunci digunakan untukmelakukan enkripsi terhadap suatu pesan (*messages*) dan kunci yang lain digunakan untuk melakukan dekripsi terhadap pesan tersebut. Kedua kunci tersebut mempunyai hubungan secara matematis sehingga suatu pesan yang dienkripsi dengan suatu kunci hanya dapat didekripsi dengan kunci pasangannya. (Sihombing, 2020)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dimaksud dengan tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait denganinformasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.” Penanda tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan tanda tangan elektronik. Definisi tersebut mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan. *Digital signature* dalah sebuah pengaman pada data digital yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi (*private signature key*), yang penggunaannya tergantung pada kunci publik (*public key*).

Penerapan Peradilan Elektronik sangat membantu dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan yang Agung, yang pada poin 10 mewujudkan Visi MA dalam Cetak Biru Reformasi Peradilan 2010-2035 yaitu mewujudkan Peradilan Modern. Badan Berbasis Teknologi Informasi Terintegrasi. Dalam upaya mewujudkan Visi Mahkamah Agung, telah diluncurkan Modernisasi Manajemen Perkara, mulai dari Pelaporan Perkara Berbasis Elektronik hingga Peradilan berbasis online. Lahirnya kewajiban pengiriman e-dokumen ini didasari pada tujuan untuk mempercepat proses minutasi perkara di Mahkamah Agung. SK KMA 119/2013 yang lahir tiga tahun kemudian setelah SEMA 14 Tahun 2010 mendorong pemanfaatan dokumen elektronik yang dikirim oleh pengadilan pengaju.

Jika SEMA 14 Tahun 2010 memanfaatkan dokumen elektronik untuk mempercepat penyusunan draft putusan, maka SK KMA 119/2013 menjadikan dokumen elektronik sebagai bahan “bacaan” hakim agung dalam rangka membaca berkas secara serentak. Oleh karena itu jenis dokumen elektronik yang diwajibkan dikirim oleh pengadilan pengaju bukan hanya meliputi 3 item seperti ketentuan SEMA 14/2010, tetapi harus ditambah sehingga meliputi juga memori kasasi, kontra memori kasasi, bahkan relaas pemberitahuan putusan banding, akta pernyataan kasasi/peninjauan kembali dan tanda terima memori kasasi. Berdasarkan kebutuhan tersebut, Mahkamah Agung melakukan perubahan terhadap SEMA 14 Tahun 2010 dengan menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2014 (Purwandani, 2022)

Teknologi dan media baru semakin banyak digunakan dalam praktik perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga Organisasi Internasional semakin memikirkan tentang pengakuan hukum atau dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Akhirnya dorongan datang dari United Nations Commission on International Trade Law, United Nations Commission on International Trade Law, Model Law on Electronic Commerce (selanjutnya disebut UNCITRAL), mengeluarkan UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce* pada tanggal 16 Desember 1996. Keberadaan Model Law ini sesungguhnya diajukan untuk menawarkan model hukum kepada negara-negara yang telah memiliki ataupun belum memiliki peraturan terkait materi ini. Namun yang harus dipahami bahwa Model Law sifatnya bebas, artinya negara-negara diberi kebebasan dalam memilih, apakah inign mengikuti atau tidak.

Kehadiran Model *Law* memberikan dorongan kepada banyak negara di dunia untuk lebih berbenah diri dan mengubah pandangan bahwa hukum pembuktian tradisional tidak lagi mampu beradaptasi dengan model perdagangan elektronik, sistem layanan pemerintahan berbasis elektronik dan sistem pertukaran informasi yang cepat. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan produk hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dari transaksi-transaksi elektronik melalui jaringan elektronik, serta untuk memberikan pengakuan terhadap kekuatan hukum dari alatbukti elektronik khususnya tanda tangan elektronik

Saat ini masyarakat dunia mengalami perubahan zaman menuju era masyarakat informasi, tidak terlepas bagi masyarakat Indonesia yang diwajibkan mampu mengikuti perkembangan tersebut agar tidak masuk ke dalam jurang *digital divide*, yakni ke tidak seimbangan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi yang mengakibatkan keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Salah satu bentuk perubahan yang terjadi yakni mulai dilakukannya penerapan tanda tangan elektronik atau *digital signature* dalam dokumen, baik itu dokumen perjanjian ataupun kontrak.

Kehadiran Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya di singkat UU ITE) dianggap sebagai dasar kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani dengan *digital signature* (tanda tangan elektronik) sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sebagaimana yang diatur pada Pasal 18 juncto Pasal 7 juncto Pasal 11 UU ITE. Namun aturan tersebut bertentangan dengan apa yang diatur pada Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkandalam Undang-Undang. Sedangkan pengertian akta otentik berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Akibat terjadi suatu pertentangan aturan tersebut, maka apabila salah satu pihak mengajukan gugatan dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, makadi dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan, hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum, karena dia yang paling berkuasa dalam memutuskan suatu perkara dan karena dia juga yang dapat memberi suatu vonnis van de rechter, yang tidak langsung dapat didasarkan atas suatu peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis.

Era digital yang semakin berkembang juga ditambah dengan kondisi pandemic Covid–19 Transaski elektronik yang menggunakan Digital Signature atau Tanda Tangan Elektronik dapat menjadi solusi pemenuhuan legalitas dokumen. Tanda Tangan Elektronik (TTE) memiliki kekuatan dan akibat hukum hukum terhadap suatu surat perjanjian, akta selama memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan. Digital signature adalah sebagai bukti identifikasi para pihak, sebagai syarat formalitas, sebagai tanda persetujuan, mengefisensikan maksud dari para pihak dalam sebuah perikatan yang terjadi melalui transaksi elektronik. Kekuatan beban pembuktian yang melekat dalam digital signature ditinjau dari pembuktian hukum acara perdata memiliki kekuatan beban bukti setingkat dengan akta dibawah tangan, oleh karena itu kekuatan beban bukti yang melekat dalam tanda tangan surel hanya kekuatan pembuktian formil dan pembuktian materiil.

Dalam kegiatan e-commerce dokumen elektoronik, digital signature dikategorikan sebagai bukti tertulis, tetapi terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dan dokumen elektronik yakni adanya syarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas. Masalah akan muncul ketika seseorang hendak bertransaksi dan tanda tangan elektornik yang dibuat saat menyatakan sepakat untuk bertransaksi. Apakah mempunyai kekuatan hukumyang mengikat perjanjian tersebut serta pada saat pembatalan transaksi. Perjanjian Elektronik atau e –contract yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingandalam transaksi elektronik dan berbentuk dokumen elektronik, yang apabila salah satu pihak wanprestrasi maka pihak yang dirugikan dapat menggugat ke Pengadilan dengan alat bukti dokumen elektronik tersebut Keabsahan transaksi dan kekuatan pembuktian, transaksi elektronik yang menggunakan kode atau nomor yang tersimpan di computer menjadi alat bukti yang digunakan dalam pembuktian keperdataan dibidang perdagangan dengan menggunakan e-contract termasuk menggunakan Digital Signature (tanda tangan elektronik). (Mayasari, 2022)

Alat bukti utama dalam hukum pembuktian keperdataan adalah alat bukti tertulis yang bagi perdagangan melalui electronic commerce menjadi masalah aktual karena electronic signature. Oleh karena itu maka penelitian ini dilakukan dengan menginventarisasi, mensistematisasi, menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah pembuktian perdata di Indonesia dengan pengembangan hukum atas informasi elektronik dan electronic signature. Nampak bahwa ternyata melalui analisis pasal-pasal bukti tertulis yang digunakan untuk menjadi dasar keabsahan informasi elektronik dan electronic signature tidaklah mudah karena terdapat multitafsir. Maka satu-satunya cara yang dilakukan adalah melalui penemuan hukum (rechtvinding) atas bukti tertulis itu dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif dan filosofis.

Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sebuah digital signature, dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis. Tetapi, terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dan dokumen elektronik atau digital signature, yakni adanya syarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas. Permasalahan akan muncul ketika seseorang orang tersebut menyatakan sepakat untuk bertransaksi, kekuatan mengikat dari kontrak tersebut serta pembatalan transaksi dan sebagainya. Salah satu isu yang krusial dalam transaksi E-commerce adalah yang menyangkut keamanan dalam mekanisme pembayaran (payment mechanism) dan jaminan keamanan dalam bertransaksi (security risk) seperti Informasi mengenai transfer data kartu kredit dan identitas pribadi konsumen, yang dalam hal ini ada dua permasalahan utama yaitu: pertama mengenai Identification Integrity yang menyangkut identitas pengirim yang dikuatkan lewat tanda tangan digital (digital signature), kedua mengenai message integrity yang menyangkut apakah pesan yang dikirimkan oleh pengirim benar-benar diterima oleh penerima yang dikehendaki (intended recipient). (Barkatullah, 2019)

Penggunaan digital signature dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa: “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”. (Kresna) Tanda tangan elektronik secara keabsahan telah diatur pemerintah dengan mengeluarkan beberapa peraturan resmi. Secara fungsi tanda tangan elektronik ini berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi dan autentifikasi atas identitas penandatanganan sekaligus menjamin keutuhan dan keautentikan dokumen. Tanda tangan elektronik makin menunjukkan identitas penandatangan yang diverifikasi berdasarkan data pembuatan tanda tangan elektronik di mana data pembuat tanda tangan elektronik dibuat secara unik yang hanya merujuk pada penandatanganan. Selain itu, kelebihan tanda tangan elektronik dibanding tanda tangan manual dapat membuat sebuah dokumen tersebut tidak valid karena terjadinya perubahan pada dokumen baik itu tulisan maupun metadata tanda tangan tersebut serta dokumen akan lebih terjamin dari modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini dapat memudahkan proses pembuktian tanda tangan manual yang secara detail membutuhkan pemeriksaan di laboratorium forensik untuk membuktikan keasliannya. (Budi K. Hutasuhut, 2019)

Tanda Tangan Elektronik (TTE) dapat menjadi solusi pemenuhan legalitas dokumen di era digital. TTE memiliki kekuatan dan akibat hukum seperti halnya tanda tangan manual, selama memenuhi persyaratan. Selain itu harus ada cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangan dan mengindentifikasi bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik terkait. Tanda tangan manual memiliki jaminan identitas penanda tangan, keutuhan konten dokumen, dan nirsangkal atau persetujuan penanda tangan. Sama halnya dengan tanda tangan manual, ia meyakinkan bahwa TTE juga memiliki jaminan yang sama

Pasal 1 Angka 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika:

1. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan.

2. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan.

3. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.

4. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui

5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengindentifikasi siapa Penandatangannya.

6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Dari keenam syarat diataslah akan memperkuat keabsahan dan kekuatan dari penggunaan tanda tangan elektronik dalam suatu kontrak/perjanjian.

Tanda tangan elektronik dapat menjamin keamanan dokumen yang ditanda tanganinya dalam aspek *integrity*, *authentication*, serta *non-repudiation*, yaitu:

1) *Integrity*: Tanda tangan elektronik dapat memastikan bahwa pesan yang dikirim adalah pesan yang sebenarnya dan tidak dimodifikasi pada saat transmisi. Hal ini dikarenakan pada dokumen asli tidak diberlakukan proses enkripsi, sehingga dokumen dapat dibaca oleh banyak pihak. Keaslian pesan dapat diperoleh dengan membandingkan *message digest* dari dokumen asli dengan *plaintext* hasil verifikasi tanda tangan elektronik. Jika hasilnya sama, maka dokumen telah terjamin keasliannya.

2*) Authenticity:* Tanda tangan elektronik dibuat dengan mengenkripsi message digest dari pesan asli menggunakan kunci privat pengirim. *Ciphertext* ini hanya bisa didekripsi menggunakan pasangan kunci publik dari kunci privat tersebut, sehingga jika hasil verifikasi membuktikan bahwa message digest dokumen sama dengan hasil dekripsi dari *ciphertext*, maka dapat dipastikan bahwa pengirim adalah benar orang yang memiliki kunci privat tersebut.

*3) Non-repudiation*: Jika tanda tangan digital telah terbukti ditandatangani menggunakan kunci privat tertentu, maka tidak dapat disangkal bahwa pemilik kunci privatlah yang telah menulis dokumen tersebut. (Azdy, 2016)

Eksistensi alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah semakin diperkuat dengan terbitnya UU ITE pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE yang berbunyi : *“(1). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti* hukum *yang sah (2). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.*

Pengakuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan hanya terbatas pada tataran pengaturan hukum materiil dan belum menjangkau pengaturan secara formil. Meskipun demikian, menurut Efa Laela Fakhriah, berdasarkan asas peradilan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak ada, dan asas hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, maka UU ITE yang telah mengatur bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, dapat digunakan sebagai dasar di persidangan.

Sebagai contoh tentang keautentikan sebuah tandatangan elektronik harus memenuhi dua unsur, pertama keotentikan materiil meliputi kejelasan syarat subyektif dan obyektif, termasuk kecakapan bersikap, kejelasan waktu dan tempat, (Confidentiality) dapat ditelusuri kembali, terjamin keutuhan data atau keamanan informasi, aslinya harus sesuai dengan copynya. Kedua, keotentikan secara formil yaitu sesuai bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, termasuk media dan format tertentu. Pembacaan, yaitu apakah yang menjadi bukti telah melakukan pembacaan, pencantuman waktu dan jaminan waktu telah dituliskan dengan benar (time-stamping). Keamanan dokumen beserta subtansinya, yaitu apakah historical data terhadap dokumen akta sudah jelas dan Pemeliharaan Log atau journal-notaris (protokol notaris) benar dan telah terpelihara dengan baik.

Dengan diperhatikannya dua unsur diatas (materiil dan formil), akan membantu Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Mengenai pembuktian isi dari dokumen itu sendiri memang tidak mudah untuk dibuktikan. Sifat yang ingin dibuktikan adalah sifat integrity. Sifat ini dapat dibuktikan jika digunakan tanda tangan elektronik untuk mengesahkannya. Berkenaan dengan keotentikan suatu tandatangan elektronik, maka dapat dibedakan sesuai dengan faktanya, Pertama, Jika tandatangan elektronik belum terpercaya, namun para pihak telah sepakat untuk mengakui, maka dapat langsung diakui keasliannya tanpa harus dibuktikan. Kedua, Jika tandatangan elektronik belum dapat terpercaya dan salah satu pihak tidak mengakui, maka pengadilan harus dapat membuktikan bahwa tidak ada pemalsuan atau kesalahan sistem, sehingga hakim memerintahkan pemeriksaan kebenaran dengan menggunakan seorang ahli forensik, untuk mengetahui apakah telah terjadi pemalsuan atau kesalahan system. Jika tandatangan elektronik terpercaya dan telah terakreditasi dan para pihak mengakui, maka dapat langsung diakui suatu keasliannya tanpa harus dibuktikan. Keempat, Jika tandatangan elektronik telah terakreditasi dan ada pihak yang menyanggah, maka pihak yang menyanggah harus dapat membuktikan bahwa telah terjadi pemalsuan atau kesalahan prosedur. (Wahyudi)

Kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan:

**Pasal 5**

1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupak analat bukti hukum yang sah.

2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini

4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan.

b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta

**Pasal 6**

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat di akses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Sesuai uraian-uraian di atas, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah memenuhi beberapa persyaratan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. (Sihombing, 2020)

Tanda tangan elektronik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia digital saat ini. Namun, tahukah Anda bahwa tanda tangan elektronik ada lebih dari satu jenis sebenarnya, ada lima jenis yang berbeda, dan masing-masing berdasarkan tingkat keamanan serta kekuatan hukumnya.

Dampak pemalsuan dokumendapat menyebabkan konsekuensi yang serius bagi perusahaan. Pemalsuan dokumen seperti dokumen laporan keuangan dapat menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan sebab dokumen yang berhubungan dengan keuangan ini dapat memengaruhi keputusan bisnis apabila bersumber dari data yang tidak tepat.

Selain kerugian finansial, dampak pemalsuan dokumen juga dapat merusak kredibilitas perusahaan. Saat mengetahui bahwa perusahaan terlibat dengan pemalsuan dokumen, kepercayaan investor maupun mitra bisnis akan hilang. Image negatif ini pun dapat memengaruhi menurunkan pendapatan perusahaan dan kesulitan mendapatkan customer.

Dampak pemalsuan dokumen yang paling serius yaitu ancaman pidana. Jika pihak tersebut terbukti melakukan pemalsuan dokumen, perusahaan bisa menghadapi tuntutan hukum yang panjang, menyita waktu dan dapat merugikan perusahaan.

Walaupun pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan secara langsung adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, tetapi ada surat-surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung melahirkan suatu hak tertentu, misalnya cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah dan lain sebagainya. Disamping isinya dan asalnya surat yang tidak benar dari membuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya:

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang sudah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang)

2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak. (Chazawi, 2021)

Tanda tangan yang dimaksud disini adalah termasuk juga tanda tangan dengan menggunakan cap atau stempel tanda tangan. Hal ini diambil dari suatu Arrest HR (12 Februari 1920) yang menyatakan bahwa disamakan dengan menandatangani suatu surat ialah membubuhkan stempel tanda tangannya.

Tanda tangan digital tersebut merupakan suatu metode pengamanan dalam penggunaan jaringan publik sebagai sarana perpindahan data yang cukup “aman”. Dikatakan aman karena digital signature terbentuk dari rangkaian algoritma yang sangat sulit untuk dilacak atau dirusak. Tetapi, sangat sulit bukan berarti tidak bisa. Beberapa bentuk kejahatan dalam pemalsuan digital signature ini menggunakan perangkat lunak yang bisa melakukan generate terhadap digital signature tersebut (Wahyono, 2005)

Meskipun legalitas dari keabsahan penggunaan tanda tangan elektronik masih diperdebatkan akan tetapi berdasarkan ketentuan dalam UU ITE penggunaan tanda tangan elektronik dapat digunakan. Kenyataan saat ini penggunaan tanda tangan elektronik sudah dipergunakan baik dalam bentuk tanda tangan sebenarnya bahkan dalam bentuk barcode. Tanda tangan elektronik memiliki potensi rawan pemalsuan tanda tangan karena bentuknya elektronik, karena itu perlu pengamanan tanda tangan elektronik. Hukum positif di Indonesia mengatur mengenai pemalsuan tanda tangan elektronik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU ITE mengatur mengenai surat palsu. (Asufie, 2024)

Pemalsuan tanda tangan elektronik merupakan tindakan kejahatan yang semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Tindakan ini dapat menimbulkan berbagai akibat yang merugikan, baik bagi individu maupun organisasi.

**Akibat Hukum**

* **Tindakan Pidana:** Pemalsuan tanda tangan elektronik termasuk dalam kategori tindak pidana. Pelaku dapat dijerat dengan berbagai pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan perundang-undangan lainnya, tergantung pada tingkat keparahan dan dampak dari perbuatan tersebut.
* **Sanksi Pidana:** Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pemalsuan tanda tangan elektronik bervariasi, mulai dari denda hingga pidana penjara. Tingkat hukuman akan disesuaikan dengan kerugian yang ditimbulkan dan unsur-unsur yang memberatkan atau meringankan hukuman.
* **Tanggung Jawab Perdata:** Selain sanksi pidana, pelaku pemalsuan tanda tangan elektronik juga dapat dituntut secara perdata oleh pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami.

**Akibat Bagi Individu dan Organisasi**

* **Kerugian Materil:** Pemalsuan tanda tangan elektronik dapat mengakibatkan kerugian materiil yang sangat besar, seperti pencurian identitas, penipuan, penggelapan, dan kerugian finansial lainnya.
* **Kerugian Immateriil:** Selain kerugian materiil, pemalsuan tanda tangan elektronik juga dapat menimbulkan kerugian immateriil, seperti kerusakan reputasi, stres, dan trauma psikologis.
* **Kerugian Bisnis:** Bagi organisasi, pemalsuan tanda tangan elektronik dapat menyebabkan kerugian bisnis yang signifikan, seperti hilangnya kepercayaan pelanggan, kerusakan citra perusahaan, dan bahkan dapat mengancam kelangsungan usaha.
* **Kerugian Hukum:** Organisasi yang menjadi korban pemalsuan tanda tangan elektronik dapat menghadapi berbagai masalah hukum, seperti tuntutan hukum dari pihak yang dirugikan, penyelidikan oleh pihak berwajib, dan sanksi administratif.

Pemalsuan tanda tangan merujuk pada tindakan membuat atau mengubah tanda tangan orang lain tanpa izin atau kebohongan dengan maksud untuk menyesatkan atau mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Pemalsuan tanda tangan dapat terjadi dalam berbagai situasi, seperti kontrak, surat, dokumen resmi, atau transaksi keuangan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur tindakan pemalsuan tanda tangan, terutama dalam konteks pemalsuan tanda tangan elektronik. Dalam UU ITE, pemalsuan tanda tangan masuk ke dalam tindakan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi. UU ITE melarang penggunaan atau memalsukan tanda tangan elektronik secara tidak sah.

Pelaku tindakan pemalsuan tanda tangan dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk KUHP dan UU ITE. Sanksi hukum yang mungkin diberikan kepada pelaku meliputi:

1. Sanksi pidana: Pelaku pemalsuan tanda tangan dapat dikenai ancaman hukuman penjara dan/atau denda sesuai dengan Pasal-pasal yang mengatur pemalsuan tandatangan dalam KUHP dan UU ITE. Dalam Pasal 263 KUHP, pelaku dapat dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Selanjutnya Pasal 266 KUHP, pelaku dapat dijerat pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Sedangkan dalam UU ITE, berdasarkan Pasal 35 pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
2. Sanksi perdata: Pelaku pemalsuan tanda tangan juga dapat dikenai tuntutan perdata oleh pihak yang dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan pemalsuan tanda tangan. (Anlaw, 2023)

Tindakan pemalsuan tanda tangan merupakan pelanggaran hukum yang serius di Indonesia. KUHP dan UU ITE menjadi dasar hukum yang mengatur tindakan pemalsuan tanda tangan, baik yang bersifat konvensional maupun elektronik. Pelaku tindakan pemalsuan tanda tangan dapat dikenai sanksi pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penting bagi masyarakat untuk mengetahui hak-hak dan perlindungan hukum terkait dengan keabsahan tanda tangan untuk mencegah dan menindak tindakan pemalsuan tanda tangan.

Seorang ahli pidana R.Soesilo juga menjelaskan dengan mengacu pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, pemalsuan tanda tangan pada surat dan/atau dokumen dapat dikenai sanksi ketika pemalsuan tanda tangan pada surat dan/atau dokumen tersebut menerbitkan:

1. Sesuatu hak (misalnya ijazah, karcis, tanda masuk, atau surat andil);
2. Suatu perjanjian atau menerbitkan kewajiban (misalnya seperti perjanjian, seperti surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan perjanjian lainnya);
3. Pembebasan utang (seperti cek dan kuitansi);
4. Sesuatu yang boleh dipergunakan sebagai keterangan atas suatu perbuatan atau peristiwa (seperti surat tanda kelahiran dan buku kas). (Pengayoman, 2024)

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Misalnya foto dalam ijazah sekolah.

Ada beberapa jenis pemalsuan, diantaranya:

1. **Pemalsuan surat**: Membuat surat palsu, mengubah surat, atau memalsukan tanda tangan. Pemalsuan surat dapat dilakukan dengan cara mengurangkan, menambah, atau mengubah sesuatu dari surat.
2. **Pemalsuan identitas**: Memalsukan identitas diri atau badan, seperti nama, alamat, atau jabatan.
3. **Pemalsuan sumpah**: Memberikan keterangan dengan lisan atau tulisan yang disertai sumpah.
4. **Pemalsuan uang**: Memalsukan uang.
5. **Pemalsuan merek dan materai**: Memalsukan merek dan materai.
6. **Pemalsuan intelektual**: Membuat surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran.

Merujuk pada Pasal 3 eIDAS (elecetronis identification, authentification, and trust service) mengenai jenis tanda tangan elektronik yang berlaku di Uni Eropa dan bisa juga diterapkan di Amerika Serikat, menjelaskan sebagai berikut:

1. **Simple Electronic Signature:**Jenis TTE paling dasar, tidak ada metode enkripsi atau perlindungan yang signifikan, membuatnya rentan terhadap pemalsuan. Salah satu contoh dari TTE sederhana adalah ketika Anda membuat tanda tangan baik berbentuk gambar atau tulisan dengan aplikasi Word. Contoh lainnya sesederhana Anda klik ceklis “I Agree” jika hendak mengiyakan terms and conditions pada suatu transaksi elektronik.
2. **Advanced Electronic Signature**: Tanda tangan jenis advanced merupakan jenis TTE yang mampu mengidentifikasi siapa penandatangannya. Penandatangan yang menggunakan TTE ini umumnya memiliki kontrol atas dokumen. Teknologi yang diterapkan pada Advanced Electronic Signature menggunakan Public Key Infrastructure di mana melibatkan sertifikat dan sistem kriptografi. Contoh penggunaan TTE jenis advanced salah satunya seperti menandatangani kontrak bisnis secara remote. Dengan menggunakan TTE Advanced, tidak semua orang bisa menandatangani kontrak secara sembarang. Hanya yang telah memiliki invitation to access atau kode tertentu yang dapat selanjutnya menandatangani kontrak bisnis tersebut.
3. **Qualified Electronic Signature:** Pada dasarnya Qualified Electronic Signature merupakan salah satu jenis TTE yang memiliki kekuatan hukum setara dengan tanda tangan konvensional. Sama seperti Advanced di mana menggunakan teknologi canggih untuk memastikan keamanan dan otentikasi yang kuat. Yang membedakan keduanya adalah penyedia TTE Qualified perlu menyediakan verifikasi biometrik untuk kesesuaian identitas serta audit trail menyeluruh atas dokumen yang berisi TTE Qualified. Sebagai contoh di Indonesia, penyedia TTE Qualified dapat dikatakan yang sudah termasuk sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) karena telah memenuhi persyaratan di atas. Sehingga bila Anda menandatangani dokumen penting melalui PSrE, maka dapat dikatakan sudah menggunakan Qualified TTE.

Selanjutnya di Indonesia, tangan elektronik dibagi menjadi dua jenis berdasarkan kekuatan hukum yang disebut pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik:

1. **Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi:**Ini adalah jenis tanda tangan elektronik yang paling kuat dan aman. Dikeluarkan oleh lembaga yang disebut Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE). Tanda tangan jenis ini memiliki kekuatan hukum yang sah di pengadilan, sama seperti tanda tangan biasa di atas kertas.
2. **Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi:** Jenis tanda tangan ini tidak melibatkan PSrE dan bukti identitasnya tidak sekuat tipe yang tersertifikasi. Meskipun bisa digunakan, tapi kekuatan hukumnya tidak sekuat tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Dari pembahasan di atas, kita mengetahui bahwa terdapat beragam jenis tanda tangan elektronik yang bisa digunakan. Namun, jenis tingkat lanjut merupakan pilihan terbaik. Alasannya, jenis ini paling aman, terenkripsi, dan setara dengan tanda tangan basah. Oleh karena itu, jenis ini memiliki kekuatan hukum yang tinggi dan diakui keabsahannya di pengadilan.

Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Berikut adalah beberapa ciri tanda tangan elektronik yang tersertifikasi.

**1. Fungsi**

Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi memiliki fungsi untuk mengesahkan atau menandatangani dokumen dengan lebih akurat. Penggunaan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, di antaranya adalah surat resmi, keperluan perbankan, serta pengajuan kredit. Melalui penggunaan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi, transaksi bisnis dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan tepercaya.

**2. Bentuk**

Bentuk umum dari Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi termasuk gambar tangan yang dihasilkan secara elektronik, tanda tangan digital yang dihasilkan melalui proses kriptografi, atau metode otentikasi lainnya yang telah disetujui oleh pihak berwenang. Selain itu, dibuat dengan mekanisme kriptografi, kekuatan hukum tanda tangan digital elektronik tersertifikasi tentunya berbeda dengan tanda tangan basah yang tidak tersertifikasi.

**3. Proses Pembuatan**

Pembuatan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi melibatkan penggunaan metode kriptografi asimetris yang merupakan teknologi kunci dalam memastikan keamanan dan validitas tanda tangan tersebut. Adapun metode kriptografi asimetris atau kriptografi kunci publik merupakan sebuah sistem keamanan yang menggunakan sepasang kunci untuk mengenkripsi dan dekripsi data, yaitu kunci publik dan kunci privat.

**4. Kekuatan Hukum**

Salah satu ciri khas yang paling menonjol dari Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah kekuatan hukumnya. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi secara khusus diatur dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan demikian, Anda tidak perlu khawatir tentang perlindungan dan keabsahannya.

**5. Validitas**

Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dapat divalidasi menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan PSrE Indonesia. Sertifikat Elektronik ini memuat informasi identitas penandatangan, seperti nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini memastikan bahwa Tanda Tangan Elektronik benar-benar dibuat oleh orang yang bersangkutan.

Tanda tangan elektronik baru bisa dinyatakan sah jikalau memakai sistem elektronik yang selaras dengan aturan yang berlangsung di Indonesia. Suatu bukti digital pada perihal ini tanda tangan digital bisa mempunyai kekuatan hukum jikalau informasinya bisa diamankan keutuhannya, bisa dipertanggungjawabkan, bisa diakses, serta bisa disajikan, sehingga menjelaskan suatu kondisi. Orang yang mengemukakan suatu bukti elektronik mesti bisa mengungkapkan bahwasanya informasi yang dipunyainya bersumber dari sistem elektronik yang terpercaya. Dokumen elektronik pada hukum agenda perdata bisa diklasifikasikan selaku instrument bukti sangkaan UU yang bisa ditolak (rebuttable presumption of law) ataupun setidaknya termasuk bukti atas sangkaan hakim (rechtelijke vermoden). (Khairatus Sulma, 2022)

Peran alat bukti elektronik atau digital sebagai alat bukti yang sah tidak berjalan mulus. Pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan yakni Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 terkait dengan adanya pengajuan uji materiil terhadap pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 44 huruf b UU ITE, dan juga pasal 26 huruf a undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945. (Ariana, 2022)

Berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, pihak pemohon beranggapan hak-hak konstitusionalnya yang diatur dalam UUD NRI 1945 telah dirugikan atau setidaknya berpotensi untuk dilanggar dengan berlakunya pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 44 huruf b UU ITE. Pemohon mengajukan permohonan terhadap MK untuk menguji UU ITE karena MK mempunyai kewenangan dari pasal 24c ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa MK berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji ketentuan undang-undang terhadap UUD NRI 1945 berdasarkan ketentuan pasal 7 undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan hukum UUD NRI 1945 adalah lebih tinggi dari undang-undang, sehingga setiap ketentuan yang dimuat undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945, jika terdapat ketentuan yang dinilai bertentangan maka dapat dimohonkan ke MK untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang. (Sugiarto, 2013) Kewenangan MK dalam menguji ketentuan undang-undang terhadap UUD NRI 1945 didasarkan pada teori Trias Politika yang menyebabkan bahwa kekuasaan pemerintah negara terbagi menjadi tiga jenis yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili. (Kansil, 2000)

Mahkamah konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, salah satu kewenangannya menguji peraturan perundang-undangan adalah berdasarkan pasal 24 huruf c UUD NRI 1945. Isi Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap pengujian ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 44 huruf b UU ITE terhadap undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik tidak dapat dikatakan sebagai barang bukti maupun alat bukti yang sah sebelum adanya perizinan dari aparat penegak hukum. Sebagai lembaga satu-satunya yang berwenang melakukan penafsiran konstitusi atas legalitas undang-undang, di sini Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran sendiri agar tidak terjadi tindakan kewenangan atau tidak sah terutama oleh aparat penegak hukum dalam mengajukan alat bukti elektronik. Beberapa latar belakang diputuskannya Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 adalah:

1. Bahwa perekaman itu merupakan pembatasan hak asasi manusia yang harus diatur dengan undang-undang dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan oleh orang yang tidak berwenang untuk itu.

2. Bahwa keberadaan norma dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) dan pasal 44 huruf b UU ITE tidak mengatur secara tegas mengenai alat bukti yang sah adalah berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan perekaman. Tidak adanya pengaturan yang dapat menciptakan situasi seperti yang dialami pemohon, dan dapat saja dianggap dan dikatakan telah melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, menerima pemberian dan/atau janji, hanya didasarkan pada hasil rekaman yang tidak sah atau ilegal yang dilakukan oleh setiap orang yang tidak memiliki kewenangan untuk itu tanpa kecuali dalam hal ini hasil rekaman.

3. Bahwa perekaman yang dilakukan secara tidak sah (ilegal) atau tanpa izin/persetujuan orang yang berbicara dalam rekaman, atau dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembicaraan, secara jelas melanggar hak privasi seseorang (a reasonable expectation of privacy) dari orang yang pembicaraannya telah direkam sehingga bukti rekaman tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena diperoleh secara ilegal bahkan sekalipun yang melakukan perekaman tersebut adalah aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Intelijen Negara, dan Kejaksaan Agung atau Kepolisian Republik Indonesia, jika di dalam melakukan perekaman tidak berdasarkan surat perintah perekaman yang sah sesuai dengan undangundang yang berlaku, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

4. Oleh karenanya logis apabila hasil rekaman yang dilakukan secara tidak sah atau ilegal atau tidak didasarkan atas aturan perundang-undangan yang berlaku, secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

5. Bahwa untuk menjadikan kaidah undang-undang yang memuat norma tentang informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) dan pasal 44 huruf b UU ITE menjadi conditionally constitutional, maka kaidah tersebut haruslah dimaknai bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia adalah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil contohnya yang diperoleh Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya. ( Arief Heryogi, et al, 2019)

Undang-undang memang tidak mungkin memuat ketentuan yang rinci dan biasanya bersifat umum. Oleh karenanya, seringkali diperlukan penafsiran final oleh Mahkamah Konstitusi (dalam hal diajukan judicial review) agar dalam pelaksanaannya berkekuatan hukum mengikat. Di lain sisi, dengan adanya Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 alih-alih penafsiran Hakim membuatnya menjadi lebih jelas, sebaliknya malah menimbulkan kontroversi. Ada yang berpendapat bahwa pasca putusan MK tersebut, semua rekaman elektronik baik berupa suara, gambar, video atau CCTV tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti (tidak sah sebagai alat/barang bukti) apabila bukan dibuat atau tanpa seizin oleh aparat penegak hukum.

Dampak yuridis dari adanya Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 telah merubah definisi tentang alat bukti elektronik yang sah. Sebagaimana Putusan MK Nomor 20/PUUXIV/2016 ini dinilai bertolak belakang dengan semangat dibuatnya UU ITE, yaitu untuk memberikan perlindungan atau kepastian hukum atas transaksi elektronik yang semakin umum dilakukan. Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 menyebabkan suatu kekaburan norma terkait dengan kedudukan alat bukti elektronik yang sah. Dengan adanya kekaburan norma tersebut, diperlukan suatu kajian kembali mengenai pengaturan hukum dari kedudukan alat bukti elektronik dan prosedur perolehannya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan Tentang Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia, maka agar tidak terlalu meluas, maka dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana agar tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dapat mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan?

2. Bagaimana prosedur memperoleh tanda tangan elektronik yang sah dan mempunyai kekuatan hukum?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdsasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dapat mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan
2. Untuk menganalisis prosedur memperoleh tanda tangan elektronik yang sah dan mempunyai kekuatan hukum

**D. Manfaaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secaral teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiranl bagi kalangan akademik guna pengembangan ilmu pengetahuan sehingga nantinya hasil penulisan ini dapat menjadi salah satu bahan tambahanl referensi sebagai sumber pustaka bagi para akademisi. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait regulasi yang mengatur tentang keabsahan tanda tangan elektronik dalam

pembuktian hukum perdata di Indonesia tersebut dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya berdasarkan ketetapan hukum yang telah berlaku. Maka secara tidak langsung penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi opemikiran bagi pemerinth dalam pemaksimalan peraturan mengenai keabsahan tanda tangan elektronik sebagai pembuktian hukum perdata di Indonesia. Selain itu, hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini diharapkan juga dapat menjadi rujukan oleh par penegak hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian dan keseimbangan hukum, dalam upaya untuk mempertimbangkan atau menciptakan transparasi alat pembuktian hukum.

**E. Originalitas Penelitian**

Peneliti bertujuan untuk melihat referensi beberapa penelitian terdahulu sebagai telaah Pustaka yang relevan sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembanding guna sebagai bahan kajian yang lebih teliti dan akurat.

*Pertama*, tesis yang ditulis oleh Muhamma Khairuddin yang merupakan mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) tahun 2023. Judul tesis tersebut adalah “Keabsahan Tanda Tangan Notaris dn Para Pihak Secara Elektronik Pada Akta Notaris” (Khairuddin, 2023) secara umum , penelitian tersebut membahas konteks bagaimana kedudukan tanda tangan elektronik seorang notaris dan juga pra pihak-;pihak yang bersangkutan menggunakan tanda tangan elektronik apakah mempunyai kedudukan hukum tetap atau menyimpangi aturan.

Hasil dalam penelitian tersebut memperlihatkan bahwa Mengenai keabsahan pada tanda tangan elektronik tersebut belum adanya substansi didalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur terkaitketentuan penerapan tanda tangan elektronik, sehingga pembuatan akta tetap harus dibuat di hadapan Notaris dan ditandatangani dengan tinta basah. Penerapan tanda tangan elektronikipada proses pembuatan akta Notaris, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Kecuali terdapat peraturan yang secara eksplisit mengatur.

Terciptanya kepastian dan kemanfaatan hukum dalam mengimplementasikan cyber notary diperlukan pembaharuan dan harmonisasi regulasi terkait peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam penggunaan tanda tangan elektronik, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga, dalam penggunaan tanda tangan elektronik Notaris tidak memiliki permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Ari Yogatama yang merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Uiversitas Islam Sultan Agung (Unissula) tahun 2023. Judul skripsi tersebut adalah “ Analisis Yuridis Kekuatan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Legalitas Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (Uu Ite) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata)” (Yogatama, 2023). Secara umum, penelitian tersebut membahas mengenai kekuatan hukum mengenai tanda tangan elektronik ditinjau dari UU ITE

Hasil dari penelitian tersebut adalah Kekuatan hukum mengenai tanda tangan elektronik di tinjau Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik legalitas tanda tangan elektronik yang tersertifikasi berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dikatakan sah di mata hukum Ketika telah memenuhi beberapa syarat, terutama tanda tangan elektronik harus tersertifikasi guna memberikan jaminan kepercayaan bagi pemilik, yakni berupa autesitas data. Keabsahan data dan kepastian hukum hanya bisa diberikan oleh badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSeE) yang telah memiliki lisensi dari pemerintah dalam halini Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sedangkan dalam KUHPerdata setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Tabel**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Peneliti, Tahun, Dan Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Originalitas Penelitian |
| 1 | Muhammad Khairuddin, Keabsahan Tanda Tangan Notaris dn Para Pihak Secara Elektronik Pada Akta Notaris, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), 2023 | Terciptanya kepastian dan kemanfaatan hukum dalam mengimplementasikan cyber notary diperlukan pembaharuan dan harmonisasi regulasi terkait peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam penggunaan tanda tangan elektronik, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris | Peneliti akan focus untuk menganalisis bagaimana keabsahan atau kekuatan tanda tangan lektronik berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia |
| 2 | Ari Yogatama, Analisis Yuridis Kekuatan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Legalitas Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (Uu Ite) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata), Program Studi Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Uiversitas Islam Sultan Agung (Unissula) tahun 2023 | Kekuatan hukum mengenai tanda tangan elektronik di tinjau Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik | Peneliti akan focus untuk menganalisis bagaimana keabsahan atau kekuatan tanda tangan lektronik berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia |

**F. Kerangka Konseptual**

Kerangka konsep penelitian merupakan garis besar mengenai penelitian yang merupakan elemen dasar dari suatu proses berpikir. Dengan kata lain kerangka konseptual adalah uraian tentang hubungan antara variabel yang akan diamati ata diukur melalui riset yang akan dilakukan.

Untuk dapat memahami alur berfikir dalam penelitian ini, maka dapatl dilihat dari kerangka konseptual dibawah ini, yang menjelaskan bahwa setiap variabel pada kerangka pemikiran memiliki fungsi-fungsi masing-masing dalam menciptakan hukum. Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan memberi arahan asumsi mengenai domain yang akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian. Maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat diketahui sebagaimana bagan di bawah ini:

**KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN**

**HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA**

**Mengkaji prosedur memperoleh tanda tangan elektronik yang sah dan mempunyai kekuatan hukum**

**Mengkaji agar tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dapat mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan**

**Agar dapat tercipta nya Tanda Tanda Elektronik sebagai alat pembuktian mempunyai kekuatan hukum di pengadilan dan memperoleh Tanda Tangan Elektronik yang sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap**

**G. Kerangkan Teoritik**

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam beperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses ligitasi. Kompleksitas itu akan semakin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang absolut (*ultimate truth*), tetapi kebenaran yang bersifat relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk menemukan kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan. Pada saat menilai alat bukti, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh Undang-Undang, dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu:

a. Teori Pembuktian Bebas Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang beperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang.

b. Teori Pembuktian Terikat Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang beperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Lebih lanjut teori ini dibagi menjadi:

1. Teori Pembuktian Negatif Hakim terikat dengan larangan Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

2. Teori Pembuktian Positif Hakim terikat dengan perintah Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

3. Teori Pembuktian Gabungan Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian. Dalam menilai pembuktian, seorang hakim harus pula mengingat asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata. Teori ini menginginkan hakim sama sekali tidak diikat dengan hukum positif tertulis dalam hal pembuktian, tetapi penilaian pembuktian sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim. (Fakhriah, 2013) Adapun kelebihan dan kekurangan jika hakim bebas dalam pembuktian, antara lain:

1. **Kelebihan hakim bebas dalam pembuktian**

* Dengan kebebasan dapat menutupi keku rangan hakim akan pengetahuan mengenai penguasaan undang-undang. Terutama bagi hakim yang kebetulan “kurang begitu senang membaca dan belajar”, memudah kan dirinya jika tidak diikat oleh hukum positif dalam hal pembuktian.
* Dalam hal menilai keterangan kesaksian, maka jika hakim bebas, hakim dapat melakukan penilaian secara “ka rakter evidence” pada pribadi saksi, sehingga bagi saksi yang tidak dapat dipercayai hakim bebas untuk me lakukan penilaian sendiri.
* Dengan memberi hakim kebebasan di dalam pembukti an, maka perkembangan hukum pembuktian kita akan lebih cepat daripada harus menunggu proses perkembangan hu kum tertulis yang tentu jauh lebih lamban, dari perkembangan hukum tidak tertulis. Dengan demikian ha kim dalam putusannya dapat lebih menyesuaikan dengan kebutuhan hukum warga masyarakat.

1. **Kelemahan hakim bebas dalam pembuktian**

Tentu saja kelemahan yang paling mungkin dan paling mencolok adalah “BELUM SIAPNYA” mental dan penguasaan ilmu hukum sebagian besar hakim kita di Indonesia untuk menilai pembuktian itu secara terlalu bebas, terutama ke sewenang-wenangan dapat terjadi karenanya. Sehubungan teori pembuktian bebas yang menginginkan hakim bebas dalam pembuktian, timbul pertanyaan, dalam hal apa saja penganut teori pembuktian bebas itu meng inginkan hakim bebas dalam masalah pembuktian nya? Jawabannya adalah:

* Kebebasan hakim dalam hukum pembuktian merupakan kebebasan di dalam menerima alat-alat bukti. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam hukum pembuk tian ada yang disebut “*ADMISSIBILITY*”, yaitu dapat tidaknya diizinkan suatu alat bukti tertentu dalam peris tiwa tertentu. Jadi, hakim diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan kapan alat bukti tertentu digunakan.
* Penilaian yang mandiri oleh hakim. Dalam hal ini hakim mempunyai posisi yang objektif dan penilaiannya objektif pula. Dengan kebebasan yang lebih, hakim dapat melakukan penilaian yang mandiri.
* Penilaian secara mandiri pula ke arah kebenaran yang sebenarnya dari peristiwanya (ali, 2012)

Tentang kebebasan hakim ini adalah jika kita menginginkan menganut teori pembuktian bebas, maka untuk menjaga kepastian hukum dalam memberikan kebebasan hakim, juga sedikit demi sedikit kita harus mengarah kepada sistem “presedent”, yaitu mengikuti putusan hakim yang terlebih dahulu. Karena di dalam sistem Anglo Saks, yang mana hakimnya tidak terikat pada undangundang seperti sistem kontinental, lalu mengikatkan diri pada “presedent”.

Setiap sistem hukum mempunyai cara sendiri untuk mem pertahankan kepastian hukumnya. Sistem Anglo Saks tidak diikat oleh undang-undang, tetapi diikat lagi oleh presedent. Sistem kita di Indonesia pada hakikatnya tidak diikat oleh presedent, tetapi diikat oleh ketentuan undang-undang. Sebab bagaimana pun hakim tidak boleh dibiarkan terlalu bebas, mengingat bahaya kebebasan itu pun banyak sekali, apa lagi dalam negara yang masih berkembang seperti kita, di mana masih banyak faktor-faktor kultur, maupun ekonomis yang memengaruhi objektivitas hakim.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa sistem atau teori pembuktian mencakup 3 hal, antara lain:

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijs Theorie*). Pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijs Theorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang. Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras, dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (inquisitoir) dalam acara pidana
2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Intime/*Conviction *Raisonce*). Teori ini disebut juga conviction intime. Disadari bahwa alat berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri. (Hamzah, 2005)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan.

Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada undang-undang

1. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negative Wettelijke Bewijs Theorie*) HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. Yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Selain itu, hukum pembuktian adalah termasuk hukum acara perdata, ketentuannya dapat kita lihat pada konstitusi ris yang mencantumkannya huruf “i” dari lampiran pokokpokok penyelenggaraan pemerintahan yang dibebankan kepada RIS menurut pasal 51 yang berbunyi bahwa: “...Asas asas pokok hukum acara perdata, termasuk didalamnya hukum pembuktian....” Dari beberapa uraian di atas, cukup kuatlah alasan penulis jika mengatakan bahwa hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara perdata.

Dewasa ini, selama belum ada Undang-Undang Hukum acara perdata yang baru, maka HIR, RBG, dan buku IV BW masih tetap berlaku bagi hukum pembuktian. Khususnya hukum pembuktian dalam Buku IV BW disusun khusus untuk acara contradictoir dalam bidang hukum harta kekayaan di muka hakim perdata. Adapun bagi acara declaratoir atau peradilan voluntair pada asasnya tidak tidak berlaku hukum pembuktian dari Buku IV BW, kecuali diperlakukan secara analog.

Tetapi walaupun demikian, hukum pembuktian yang diatur oleh Buku IV BW, diperlakukan secara analogi maupun a contrario bagi perkara decralaratoir (atau peradilan semu). Karena, isi aturan pembuktian yang terdapat dalam Buku IV BW, aturan pembuktian yang terdapat dalam HIR atau R.bg. maka sama saja, bahwa jika dikatakan Buku IV BW hanya ber laku bagi perkara-perkara contradictoir, demikian pula HIR dan R.bg. Dari mana dapat diketahui bahwa hukum pembuktian yang diatur oleh Buku IV BW, HIR, dan R.bg. hanya ber laku bagi perkara-perkara contradictoir? Ini diatur oleh yu risprudensi, dengan putusan H.R. tertanggal 19 Desember 1932 bahwa BW Buku IV semata-mata hanya diperuntukkan bagi perkara-perkara contradictoir.

Sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud sebagai perkara-perkara contradictoir adalah perkara persengketaan perdata yang sesungguhnya, di mana jelas ada pihak yang ber sengketa, ada penggugat dan ada tergugat. Dalam hal ini pengadilan menghasilkan “putusan” yang sifatnya dimenang kan salah satu pihak yang berperkara, entah penggugat, entah tergugat. Demikan juga dalam hal adanya pihak ketiga yang melakukan intervensi. Adapun perkara decralatoir adalah perkara yang di bawah yurisdiksi peradilan voluntair (peradilan semu), dalam hal mana pengadilan tidak memberikan dua pihak yang berperkara, karena hanya ada satu pihak yang memohonkan penetapan, (Ali, 2012)

Teori Pembuktian Pembuktian di Indonesia juga memiliki parameter sehingga para penegak hukum memiliki patokan dalam mencari bukti tersebut. Parameter pembuktian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *Bewisjtheorie*

Bewisjtheorie adalah teori pembuktian yang dipakai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Dalam teori ini ada empat macam pembuktian diantaranya yang pertama adalah positief wettelijk bewisjtheorie dimana hakim terikat oleh hukum tertulis atau Undangundang yang ada saja. Dalam artian hakim hanya melihat pembuktian dari pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Diluar pasal 184 KUHAP tidak akan dipertimbangkan dalam persidangan atau dianggap masuk dalam salah satu alat bukti yang sudah ada. Hanya melihat kesesuaian bukti dan undang-undang maka hakim dapat menjatuhkan hukuman tanpa keyakinan

1. *Bewijsmiddelen*

Bewijsmiddelen adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Dalam KUHP telah jelas bahwa alat bukti terdapat pada pasal 184 yang berisi tentang keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

1. *Bewijsvoering*

*Bewijsvoering* berarti penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Teori ini lebih sesuai dengan negara yang mengikuti sistem peradilan pidana Due process model dimana sangat memperhatikan hak asasi manusia. Sehingga hak-hak tersangka begitu diperhatian, hingga bila bukti yang di dapat tidak sesuai dengan cara yang layak maka seseorang yang bersalah bisa saja dibebaskan

1. *Bewijslast*

*Bewijslast* atau sering disebut burden of proof yaitu pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Dalam hukum perdata pada pasal 163 HIR jo pasal 283 reglemen op de burgelijke jo pasal 1865 KUHPerdata yang wajib membuktikan adalah pihak yang memiliki hak atau yang membantah hak milik orang lain. Dalam hukum perdata dikenal asas actori incumbit probatio siapa yang menggugat, dialah yang wajib membuktikan

1. *Bewijskracht*

*Bewijskracht* adalah kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut mutlak milik hakim. Hakim yang menilai dan menentukan kesesuaian alat bukan yang satu dengan yang lain. Apakah bukti tersebut saling berhubungan atau tidak. dalam hukum pidana alat bukti derajatnya sama, tidak ada hierarki di dalamnya. Sehingga ditemui alat bukti pelengkap yang timbul dari bukti lain.

1. *Bewijs*

minimum *Bewijs* minimum adalah bukti minumum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam hukum pidana Indonesia ini sangat sesuai dengan pasal 183 KUHP yang mensyaratkan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Dua alat bukti tanpa keyakinan hakim tidak akan dapat menjerat si pelaku, demikian pula keyakinan hakim tanpa dua alat bukti yang sah juga tidak akan pernah bisa menjatuhkan hukuman. (Hiariej, 2012)

Menurut Gustav Radbruch, teori tujuan hukum terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini menilai masalah dari sudut pandang hukum atau yuridis.

2. Asas keadilan hukum (*gerectgheid*). Asas ini meninjau masalah dari perspektif filosofis, fokus pada konseo keadilan dalam hukum.

3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*). Asas ini meninjau masalah dari segi sosiologis, mempertimbangkan manfaat dn dampak sosial dari suatu hukum

Ketiga tujuan tersebut, krusial dalam penyelesaian kasus sebab melalui penemuan hukum, seorang ahli hukum diharapkan dapat menyeimbangkan ketiga tujuan tersebut. Meskipun terkadang ketiga tujuan tersebut sering sejalan, tidak jarang pula ketiga tujuan tersebut berlawanan.

1. Kepastian hukum Dalam penyelesaian kasus, seorang yuris harus memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan peraturan perundang-undangan, kasus-kasus terdahulu maupun dengan sumber hukum lain. Meskipun hal ini tampaknya jelas, beragam masalah terkait kepastian hukum sering terjadi.

2. Keadilan Penerapan umum peraturan yang ada tanpa mempertimbangkan situasi dan fakta dari kasus tersebut secara tak terelakkan akan mengarah pada ketidakadilan di Indonesia sering disebabkan oleh hakim-hakim yang

3. Kemanfaatan Ini berarti bahwa aturan hukum harus berlaku umum dan melayani tujuan yang sah sesuai dengan kepentingan publik.

Dari tiga prinsip yang disebutkan di atas, kemanfaatan termasuk yang paling sulit untuk diterapkan sebab pejabat atau pembuat kebijakan pada kenyataannya, saat mereka menerapkan aturan untuk melayani kepentingan pribadi mereka atau orang lain, sering bertumpu pada argumen kemanfaatan. Namun, untuk membuktikan apakah tujuan kemanfaatan benar digunakan dengan baik oleh pembuat kebijakan, bukanlah hal yang mudah

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.

2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. (Rahardjo, 2012)

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

2. Beberapa instanti penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.

3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum. (Soeroso, 2011)

**H. Metode Penelitian**

1. Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis data kulitatif. Kualitatif sendiri memiliki arti prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang perilaku yang dapat diamati. Pengumpulan data dimulai dengan melakukan studi literature. Studi literature adala yang mempelajari berbagai buku referensi tentang hasil penelitian sebelumnya yang sejenis berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang diteliti.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif. Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*) Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan oeh penulis dalam membahas permasalahan ini adalah dengan menggunakan Pendekatan undang-undang (*Statuta Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berhubungan dengan isu hukum yang di tangani. (Ibrahim, 2007)

Dalam penelitian ini penulis menganalisis dan menelaah mengenai pengaturan semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan Dokumen Elektronik

1. Sumber Data

Pelnulis pada pelnellitian ini melnggunakan sumbelr data Selkundelr, yakni: Sumbelr data selkundelr ialah sumbelr data lain yang tellah dipublikasi selbellumnya. Untuk data selkundelr dapat dipelrollelh dari sumbelr data selpelrti dolkumeln, lapolran pelnellitian, data instansi, makalah, jurnal, wawancara, maupun sumbelr data lainya yang melnunjang pelnellitian atau dapat juga mellihat dari belrbagai sumbelr di intelrnelt

1. Metode pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pegumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari perpustakaan dan beberapa buku referensi yang didapatkan

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini

1. Pengolahan dan Analisis Data

Pelngollahan dalam melngumpulkan data pada pelnelltian ini dilakukan delngan melnggunakan belbelrapa telknik pelngumpulan data, yakni: Langkah pelrtama melngumpulkan data, dimana dapat melncari mellalui studi-studi litelraturel, pelnellitian telrdahulu, pelr-undang undangan, dan dolkumelntasi yang belrkaitan delngan masalah yang ditelliti. seltellah data-data telrkumpul kelmudian data direlduksi, artinya data disellelksi dan di seldelrhanakan atau diuraikan dalam belntuk narasi selhingga melnjadi kalimat yang jellas dan mudah dipahami. Kelmudian diadakan pelmilihan data, yaitu rangkaian data yang tellah disellelksi yang belrhubungan delngan masalah pelnellitian baik dari data yang dipelrollelh atau yang telrjadi di lapangan.

Kelmudian data yang tellah disellelksi mellalui belbelrapa kritelria telrselbut diollah dan dianalisa, apakah data yang tellah dipilih melmpunyai kelsamaan dan pelrbeldaan didalam pelnelrapanya di lapangan. Lalu ditarik kelsimpulan antara kelduanya, Apabila kelsimpulan yang ditarik kurang baik atau melmuaskan dapat melngulang lagi mellalui pelngumpulan data. Seltellah data-data telrkumpul selcara lelngkap, kelmudian diadakan pelnyajian data kelmbali yang dibuat selcara sistelmatis, selhingga dipelrollelh kelsimpulan yang lelbih baik dan factual.

* 1. **Rencana Sistematika Penulisan**

**Bab I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

**Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai norma, konsep-konsep hukum dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang diteliti.

**Bab III : METODE PENELITIAN**

Didalam bab ini akan diuraikan secara sistematis tentang hasil- hasil penelitian yang telah dilakukan, dan analisis terhadap permasalahan yang diangkat oleh Peneliti.

**Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Didalam bab ini akan diuraikan secara sistematis tentang hasil- hasil penelitian yang telah dilakukan, dan analisis terhadap permasalahan yang diangkat oleh Peneliti.

**BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini akan diuraikan Kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian ini. Kesimpulan memuat pernyataan singkat dan akurat dari hasil penelitian. Kemudian, saran yang merupakan argument penutupdan hasil analisi berupa rekomendasi yang mengandung pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum ke depan

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Tinjauan Umum Tanda Tangan Elektronik**
2. **Pengertian Tanda Tangan Elektronik**

Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Pengertian tanda tangan elektronik dalam UU ITE dan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) tidak ada perbedaan, di dalam PP PSTE tercantum dalam Pasal 1Ayat (19). (Makarim, 2015) UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) Model Law on Electronic Signatures 2001 mendefinisikan tanda tangan elektronik sebagai:

*"electronic* signature *means data in electronic form in, affixed to or logically associated with, a data message, which may be used to identify the signatory in relation to the data message and to indicate the signatory's approval of the information contained in the data message".*

Sesuai definisi di atas, maka terjemahannya adalah tanda tangan elektronik berarti data dalam bentuk elektronik, ditempelkan, atau terkait secara logis dengan data pesan, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penandatangan dalam kaitannya dengan data pesan dan menunjukkan penandatanganan persetujuan dari informasi yang di dalam data pesan.

**Edmon Makarim** juga berpendapat bahwa tanda tangan elektrnik pada dasar nya berfungsi sama seperti tanda tangan di atas kertas, hal itu dilihat berdasarkan "*functional equivalent approach*" yang berarti pendekatan yang mempersamakan suatu tanda tangan elektronik secara fungsional dengan suatu tanda tangan elektronik di atas kertas.

Setiap sistem elektronik instansi yang akan membutuhkan tanda tangan elektronik dari perjabat terkait, akan mengirimkan naskah dinas elektronik kepada sistem tanda tangan elektronik. Dengan adanya tanda tangan elektronik (TTE) ini berbagai sistem layanan akan menjadi lebih efektif dan efisien. (Amalia, 2023)

Informasi elektronik yang menggunakan jaringan publik, bisa saja seseorang berniat jahat mengganti informasi elektronik yang telah di tandatangani oleh para pihak dengan informasi elektronik lain tetapi tanda tangan tidak berubah. Pada data elektronik perubahan ini mudah terjadi dan tidak mudah dikenali. Oleh karena itu, tanda tangan elektronik harus terasosiasi dengan informasi elektronik. Terasosiasi adalah informasi elektronik yang ingin ditandatangani menjadi data pembuatan tanda tangan elektronik, dengan demikian, antara tanda tangan elektronik dan informasi elektronik yang ditandatangani menjadi erat hubungannya seperti fungsi kertas. Keuntungannya adalah jika terjadi perubahan informasi glektronik yang sudah ditandatangani maka tentu tanda tangan elektronik juga berubah. (Ronny, 2024)

Tanda tangan elektronik bukan tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas sebagaimana lazimnya suatu tanda tangan, tanda tangan elektronik diperoleh dengan terlebih dahul meciptakan suatu message *digest* atau *hast*, yaitu *mathematical summary* dokumen yang dikirimkan melalui cyberspace. (Partodihardjo, 2008)

Tanda tangan elektronik pada prinsinya berkenaan dengan jaminan untuk message integrity yang menjamin bahwa si pengirim pesan (sender) adalah benar-benar orang yang berhak dan bertanggung jawab untuk itu. Hal ini berbeda dari tanda tangan biasa yang berfungsi sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi pesan atau dokumen. Tanda tangan elektronik adalah sebuah item data yang berhubungan dengan sebuah pengkodean pesan digital yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian tentang keaslian data dan memastikan bahwa data tidak termodifikasi.

Manfaat Tanda Tangan Digital (*Digital Signature*) adalah akan menyebabkan data elektronik yang dikirimkan melalui *open network* tersebut menjadi terjamin, sehingga mempunyai manfaat dari digital signature adalah sebagai berikut:

**a. *Authenticity***

Terjaminnya integritas pesan tersebut bisa terjadi, karena keberadaan dari *digital certificate*. *Digital Certificate* diperoleh, atas dasar aplikasi kepada *Certification Authority* oleh user atau subscriber. *Digital Certificate* berisi informasi mengenai pengguna antara lain:

- Identitas

- Kewenangan

- Kedudukan hukum

- Status dari user atau pengguna

*Digital certificate* ini memiliki berbagai tingkatan atau level, tingkatan dari *digital certificate* ini menentukan berapa besar kewenangan yang dimiliki oleh pengguna. Contoh dari kewenangan atau kwalifikasi ini adalah apabila suatu perusahan hendak melakukan perbuatan hukum, maka pihak yang berwenang mewakili perusahaan tersebut adalah direksi. Jadi apabila suatu perusahaan hendak melakukan suatu perbuatan hukum maka *digital certificate* yang dipergunakan adalah *digital certificate* yang dipunyai oleh direksi Perusahaan tersebut. Dengan keberadaan dari *digital certificate* ini maka pihak ketiga yang berhubungan dengan pemegang digital certificate tersebut dapat merasa yakin bahwa suatu pesan adalah benar berasal dari pengguna tersebut.

* + 1. ***Integrity***

Penggunaan *digital signature* yang diaplikasikan pada pesan atau data elektronik yang dikirimkan, dapat menjamin bahwa pesan atau data elektronik tersebut tidak mengalami suatu perubahan atau modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Integritas atau integrity berhubungan dengan masalah keutuhan dari suatu data yang dikirimkan. Seorang penerima pesan atau data dapat merasa yakin apakah pesan yang diterimanya sama dengan pesan yang dikirimkan. la dapat merasa yakin bahwa data tersebut pernah dimodifikasi atau diubah selama proses pengiriman atau penyimpanan.

Jaminan *authenticity* ini dapat dilihat dari adanya *hash function* dalam sistem *digital signature*, dimana penerima data (*recipient*) dapat melakukan pembandingan *hash value*. Apabila *hash value*-nya sama dan sesuai, maka data tersebut benar-benar otentik, tidak pernah terjadi suatu tindakan yang sifatnya merubah (*modify*) dari data tersebut pada saat proses pengiriman, sehingga terjamin authenticity-nya. Sebaliknya apabila hash value-nya berbeda, maka patut dicurigai dan langsung dapat disimpulkan bahwa recipient menerima data yang telah dimodifikasi.

* + 1. ***Non-Repudiation* (Tidak Dapat Disangkal Kebenaranya)**

*Non-Repudiation* (Tidak Dapat Disangkal Keberadaannya), timbul dari keberadaan digital signature yang menggunakan enkripsi asimetris (*asymmetric encryption*). Enskripsi asimetris ini melibatkan keberadaan dari kunci privat dan kunci publik. Suatu pesan yang telah dienkripsi dengan menggunakan kunci privat, maka ia hanya dapat dibuka/dekripsi dengan menggunakan kunci public dari pengirim. Jadi apabila terdapat suatu pesan yang telah dienkripsi oleh pengirim dengan menggunakan kunci privatnya, maka ia tidak dapat menyangkal keberadaan pesan tersebut, karena terbukti bahwa pesan tersebut didekripsi dengan kunci publik pengirim. Keutuhan dari pesan tersebut dapat dilihat dari keberadaan hash function dari pesan tersebut, dengan catatan bahwa data yang telah di-sign akan dimasukkan ke dalam digital envelope.

*Non-repudiation* (Tidak dapat disangkanya keberadaan) suatu pesan berhubungan dengan orang yang mengirimkan pesan tersebut Pengirim pesan tidak dapat menyangkal bahwa ia telah mengirimkan suatu pesan apabila ia sudah mengirimkannya. la juga tidak dapat menyangkal isi dari suatu pesan berbeda dengan apa yang ia kirimkan apabila ia telah mengirim pesan tersebut. *Non repudiation* adalah hal yang sangat penting bagi *e-commerce* apabila suatu transaksi dilakukan melalui suatu jaringan internet, kontrak elektronik (*electronic contracts*), ataupun transaksi pembayaran.

* + 1. ***Confidentiality***

Pesan dalam bentuk data elektronik yang dikirimkan tersebut bersifat rahasia atau confidental, sehingga tidak semua orang dapat mengetahui isi data elektronik yang telah disign dan dimasukkan dalam *digital envolve*. Keberadaan *digital envolve* yang termasuk bagian yang integral dari digital signature, menyebabkan suatu pesan yang telah dienkripsi hanya dapat dibuka oleh orang yang berhak. Tingkat kerahasian dari suatu pesan yang telah dienkripsi ini, tergantung dari panjang kunci atau *key* yang dipakai untuk melakukan enkripsi. (Wibowo, 1999)

Pengamanan data dalam *e-commerce* dengan metode kriptografi melalui skema *digital signature* tersebut secara teknis sudah dapat diterima dan diterapkan, namun apabila kita bahas dari sudut pandang ilmu hukum ternyata mash kurang mendapatkan perhatian. Kurangnya perhatian dari ilmu hukum dapat dimengerti karena, khususnya di Indonesia, penggunaan komputer sebagai alat komunikasi melalui jaringan internet baru dikenal semenjak tahun 1994. Dengan demikian pengamanan jaringan internet dengan metode *digital signature* di Indonesia tentu masih merupakan hal yang baru bagi kalangan pengguna komputer.

1. **Jenis-Jenis Tanda Tangan Elektronik**

Sesuai perkembangan teknologi, terdapat beberapa moda tentang suatu tanda tangan elektronik , yakni antara lain:

1. Penggunaan kata kunci (*Password*) dan metode Hibrida (*Hybrid Methods*) Sudah menjadi suatu pengetahuan umum bagi masyarakat dewasa ini, bahwa keberadaan kode-kode akses (contoh PIN) adalah sebagaimana layaknya kunci untuk memasuki ataupun mengakses suatu sistem yang bersifat tertutup. PIN memiliki kaitan dengan User-ID (*user identification*), untuk membuktikan bahwa pemilik memiliki wewenang untuk memakai dan masuk dalam sistem. Masyarakat sudah terbiasa menggunakannya untuk menarik uang melalui ATM, transaksi dengan alat pembayaran (cred/ debit menggunakan kartu (credti/debit card), absen pegawai, penggunaan lainnya yang pada pokoknya adalah difungsikan sebagai alat pemeriksa identitas dan otorisasi, dan lain sebagainya. (bany, 2016) Sementara yang dimaksud dengan metode hibrida adalah penggunaan kode akses yang dikombinasikan dengan teknologi-teknologi pengaman lainnya, sebagai contohnya adalah penggunaan tanda tangan untuk autentikasi yang dikombinasikan dengan kriptografi untuk menjaga keutuhan atau integrasi pesan. Selain itu, dapat juga dilihat dalam penggunaan "token" dalam internet banking, nasabah diminta untuk memasukkan PIN terlebih dahulu untuk mengakses sistem, kemudian memasukkan kode-kode pengacakan yang berpasangan dengan kode pengacakan pada server untuk melaksanakan transaksinya.
2. *Basic Electronic Signatures*

Tanda tangan elektronik pada kategori ini merupakan tanda tangan elektronik sederhana. Tanda tangan tersebut tidak memiliki perlindungan pada dokumen sehingga ketika konten dari dokumen diubah pengguna tidak dapat mengetahui perubahan tersebut. Selain itu, tanda tangan tidak dapat memastikan siapa identitas penandatangan dokumen. Contoh pengaplikasian tanda tangan elektronik ini adalah hasil pemindaian tanda tangan kertas yang dimasukkan ke dalam dokumen elektronik. (Hartoyo, 2020)

1. *Advanced Electronic Signatures (AdES)*

Tanda tangan elektronik AdES terhubung dengan data pengguna sehingga tanda tangan mampu mendeteksi siapa yang menandatangani dokumen elektronik. Data pengguna disimpan dalam bentuk sertifikat digital yang dibuat oleh penyedia layanan tanda tangan elektronik. Pengguna juga dapat mengetahui apakah dokumen yang telah ditandatanganinya berubah sejak dia menandatangani dokumen tersebut.

1. *Qualified Electronic Signatures (QES)*

Tanda tangan elektronik QES sama dengan AdES tetapi memiliki tingkat sekuritas lebih tinggi. Sertifikat digital yang dipakai pengguna dibuat oleh *Certificate Authority* yang bertanggung jawab mengawasi pendaftaran dan penggunaan tanda tangan elektronik.

1. Tanda Tangan Digital

Tanda tangan digital adalah tanda tangan elektronik yang digunakan untuk mengotentikasi pesan atau dokumen dan untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan belum diubah. Tanda tangan digital dianggap lebih bermanfaat daripada tanda tangan elektronik di bidang pemerintahan, bank, atau bisnis, karena keamanan yang lebih tinggi. Keamanan tersebut dicapai dikarenakan tanda tangan digital menggunakan fungsi satu arah. Menurut John Rompel (1990), fungsi satu arah sangat penting untuk membangun skema tanda tangan aman. Fungsi tersebut merupakan fungsi enkripsi yang sederhana untuk dihitung tetapi menantang untuk dibalik. Kemudian dia membahas mengenai fungsi *trapdoor*, adalah satu jenis fungsi satu arah. Dengan fungsi tersebut, proses inversi menjadi lebih mudah dengan memberikan "kunci rahasia" . Melalui pengembangan teknologi kriptografi dan kemampuan komputasi yang diperkuat, peningkatan efisiensi dapat dicapai.

1. Biometrik (*Biometrics*)

Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa biometrik adalah metode pengukuran yang digunakan untuk mengidentifikasi kejelasan individu melalui ciri-ciri intrinsiknya secara fisik atau secara perilaku. Cir-ciri yang dapat digunakan untuk pengakuan di biometrics dapat mencakup DNA, sidik jari, iris, retina, tangan atau geometri wajah, bentuk telinga, wajah, termogram suara, bau badan, darah pola kapal; tulisan tangan, dan pola menulis atau mengetik. Tanda tangan elektronik dipersepsikan identik atau sama dengan tanda tangan digital, sesungguhnya hal tersebut mempunyai pengertian yang berbeda, tanda tangan elektronik mempunyai lingkup pengertian yang lebih luas yang mencakup semua metode autentikasi secara elektronik dimana salah satunya adalah tanda tangan digital. Jenis tanda tangan elektronik selain dibedakan berdasarkan bentuk serta prosesnya pada penjabaran dan penjelasan sebelumnya, bahwa Peraturan Pemerintah Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) membedakan jenis tanda tangan elektronik (seperti yang telah disebutkan dalam latar belakang), meliputi:

1) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi

Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi harus memenuhi persyaratan;

a) dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikat elektronik;

b) dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.

2) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasis

Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

1. **Keabsahan Tanda Tangan Elektronik**

Dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) ada ketentuan tentang keabsahan tanda tangan elektronik yang menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;

2) data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;

3) segala perubahan terhadap landa langan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

4) segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

5) terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya; dan

6) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi elektronik yang terkait.

Sebagai alat bukti yang telah diakui penggunaanya, tanda tangan elektronik tentu memiliki kekuatan pembuktian yang melekat layaknya alat-alat bukti lain yang telah diatur dalam KUH Perdata, akan tetapi banyak pihak-pihak yang masih meragukan keotentikan suatu tanda tangan elektronik. Mereka cenderung berpendapat bahwa tanda tangan elektronik sebagaimana dengan dokumen elektronik lainnya dapat dengan mudah dipalsukan, dan disebarluaskan karena bersifat non face (tanpa bertatap muka) dan non sign (tanpa tanda tangan). Terlebih lagi, tanda tangan tersebut tidak dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang dalam hal ini notaris, sehingga keotentikan masih banyak diragukan.

Penjelasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tanda Tangan Elektronik menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik dibuat dengan menggunakan teknologi kriptografi asimetris, yaitu menggabungkan kunci privat dan kunci publik yang dapat menjadi suatu bukti bahwa dokumen elektronik yang dibuat merupakan kehendak sendiri dari pengirim. Otentifikasi penandatangan dokumen elektronik ditunjukkan bilamana pasangan kunci publik dan kunci privat dapat berasosiasi dengan pemilik sah yang telah didefinisikan, sehingga tanda tangan elektronik tersebut dapat menghubungkan/mengasosiasikan dokumen dengan penandatangan. Perlu diketahui bahwa tanda tangan elektronik pada dasarnya tidak dapat dipalsukan, kecuali jika penandatangan kehilangan kontrol dari kunci privat miliknya.

Tanda tangan elektronik dapat mengidentikkan dokumen yang ditandatangani dengan tingkat kepastian dan ketepatan yang jauh lebih tinggi daripada tanda tangan di atas kertas. Selain itu, sebagai alat bukti di persidangan, pembuktian tanda tangan elektronik tidak memerlukan verifikasi dengan melihat secara teliti (membandingkan) antara tanda tangan yang terdapat di dokumen dengan contoh tanda tangan aslinya seperti yang biasa dilakukan dalam pengecekan tanda tangan secara manual.

Perihal ketentuan UU ITE tentang kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik yang bertentangan dengan pengertian akta otentik dalam Undang - Undang Jabatan Notaris, maka hakim harus berpatokan pada asas hukum *lex specialis derogate lex generalis*, dimana undangundang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Berdasarkan asas hukum tersebut, maka kekuatan pembuktian dari suatu tanda tangan elektronik adalah sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik, yaitu lengkap dan sempurna, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008. (Listyana, 2014)

Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem pengaman yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :

a. dapat menampilkan kembali informasi dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan.

b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;

c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;

d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan

e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. (Letsoin, 2010)

Kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditanda tangani dengan digital signature, dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis, tetapi terdapat pengecualian, dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah tidak berlaku untuk :

a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

b. surat beserta dokumenya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta

Sedangkan eksistensi tanda tangan elektronik dalam sebuah dokumen elektronik harus diakui memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan pada dokumen tertulis lainnya. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti dan akibat hukum yang sama sebagaimana dokumen tertulis lainnya.

Tanda tangan elektronik yang menggunakan teknologi kriptografi asimetris, menggunakan dua buah kunci yaitu kunci privat dan kunci publik, maka terdapat suatu bukti bahwa dokumen elektronik tersebut merupakan kehendak sendiri dari pengirim.

Menurut **Arianto Mukti Wibowo**, agar tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dapat mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan, maka harus mendaftarkan tanda tangan elektronik tersebut pada badan *Certification Authority* (CA) atau Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PsRE) yang termasuk produk dari Lembaga Komunikasi dan Informasi (Kominfo), maka CA tersebut dapat bertindak sebagai pejabat umum, sehingga dengan memanfaatkan infrastruktur yang diberikan CA khususnya keamampuan untuk mengetahui kapan transaksi elektronik itu ditandatangani, maka transaksi elektronik yang ditanda tangani dipersamakan dengan akta otentik yang dibuat di depan pejabat yang berwenang.

Tanda tangan digital yang telah memperoleh sertifikat dari lembaga *Certification Authority*, maka akan lebih terjaminya otentikasi dari sebuah dokumen, dan tanda tangan digital sangat sulit dipalsukan dan berasosiasi dengan kombinasi dokumen dan kunci privat secara unik, apabila sudah melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan Perundang Undangan yang terkait, maka sebenarnya tidak ada aturan Undang-Undang tersebut yang bertentangan.

1. **Tanda Tangan Konvensional**

Penggunaan tanda tangan adalah suatu kebiasaan formil yang digunakan untuk menyatakan persetujuan seseorang sekaligus memastikan identitas (authentification) orang tersebut yang bertanda tangan untuk sesuatu baik yang berimplikasi hukum maupun yang tidak. Menurut **Sudikno Mertokusumo**, tanda tangan pada akta memiliki makna sebagai surat yang berisi peristiwa yang menjadi dasar perikatan atau hak, dan dibuat untuk dijadikan pembuktian. (Mertokusumo, 2006) Pengertian tanda tangan dalam arti umum, adalah tanda tangan yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan atau keterangan tersebut dapat di individualisasikan. (Budiono, 2007) Pengertian dari tanda tangan sekarang ini merujuk kepada tanda tangan tertulis seseorang di atas kertas atau yg dapat disamakan dengan itu. Inti dari tanda tangan difokuskan pada pengertian dasar tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tanda tangan itu sendiri adalah tanda sebagai lambing nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi ( telah menerima ). Jika dilihat daripengertian tersebut, pengertian tanda tangan belum tentu merujuk kepada suatu tanda tangan secara “tertulis” tetapi justru terhadap suatu penandaan, dimana tanda tersebut dapat merujuk kepada bertanda tangan itu. Penggunaan tanda tangan adalah suatu kebiasaan formil yang digunakan untuk menyatakan persetujuan seseorang sekaligus memastikan identitas (*authentification*) orang tersebut yang bertanda tangan untuk sesuatu yang baik yang berimplikasi hukum maupun yang tidak. (Tahapary, 2011) Pada dasarnya ada beberapa fungsi tanda tangan, antara lain:

1. ***Identification***.

Penerima dapat menverifikasi identitas penandatangan dengan memeriksa tanda tangan;

1. ***Authentication***.

Tanda tangan berfungsi sebagai sebuah autentikasi dari pernyataan yang telah ditulis. Pernyataan yang ditulis tersebut mencerminkan kenyataan yang benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya;

1. ***Non-repudiation of origin and/or receipt.***

Penandatangan tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirim atau menerima dokumen, kecuali jika terbukti sebaliknya;

1. ***Expression of will.***

Dengan menandatangani, penandatangan menyatakan kehendaknya dan menyatakan bahwa niat termasuk tulisannya terikat secara hukum;

1. ***Authorization***.

Penandatanganan secara implisit menyatakan yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, misalnya dalam representasi kasus;

1. ***Safeguard against undue haste.***

Dengan menempatkan tanda tangan seseorang dalam dokumen, penandatangan diberitahu tentang kemungkinan keterlibatan konsekuensi hukum;

1. ***Notice of contents.***

Secara implisit menunjukkan bahwa penandatangan mengetahui isi dokumen;

1. ***Integrity***.

Menempatkan tanda tangan seseorang di bagian akhir, merupakan jaminan terhadap dokumen sampai batas waktu tertentu bahwa dokumen belum diubah saat itu, schingga mengurangi kemungkinan tindakan pempuan:

1. ***Originality***.

Penandatanganan dokumen memungkinkan untuk membedakan yang asli dari salinan. (Louwers, 2012)

Menurut Edmon Makarim, bahwa sebagaimana lazimnya dipahami terhadap keberadaan tanda tangan secara konvensional, maka paling tidak akan memperlihatkan beberapa hal, yakni:

a. Fungsi simbolik dari otorisasi seseorang dimana dengan pembubuhan identitas suatu subjek hukum yang bertanggung jawab, bahwa apa yang dituliskan atau disampaikan, selain mempresentasikan karakteristik identitas dari seseorang (meskipun terdapat kesamaan nama orang, namun ekspresi tanda tangannya akan selalu berbeda) dan juga kewenangannya;

b. Fungsi autentikasi bahwa apa yang ditandatanganinya telah dibcanya dan diketahuinya serta dikunci dengan keberadaan pencatumuman namanya (contoh: dalam pembuatan suatu perjanjian, maka terdapat parat setiap halaman yang telah dibacanya):

c. Fungsi persetujuan bahwa tindakan penandatanganan adalah penjelmaan dari suatu tindakan persetujuan atau penerimaan terhadap konten di dalamnya:

d. Fungsi pembuktian bahwa selanjutnya konten atau informasi tersebut akan menjadi bukti hukum bagi para pihak yang menggunakannya. (Makarim, 2015)

1. **Tinjauan Umum Hukum Perdata**
2. Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata yang mengatur substansi hak (*recht*) dan kewajiban (*verplicht*) para subjek hukum dinamakan dengan hukum perdata materill, sedangkan bagaimana (caranya) para subjek hukum itu mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan mekanisme hukum tertentu disebut dengan hukum perdata formill. (Siagian, 2020)

**Sudikno Mertokusumo** memberikan pengertian hukum perdata adalah

Hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaanya diserahkan kepada masingmasing pihak. (Mertokusumo, 2003)

Hukum perdata adalah satu cabang hukum yang sangat penting karena mengatur hubungan antar individu. Dalam hukum perdata, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum. Hukum perdata juga memberikan nilai dan batasan bagi berbagai tingkah laku manusia, baik secara perorangan maupun bersama-sama.

Hukum perdata adalah satu cabang dari hukum yang melindungi hak dan kepentingan perorangan, baik secara perorangan atau bersama-sama. Hukum perdata berlaku untuk semua orang, bahkan korporasi atau badan hukum. Hukum perdata berbeda dengan hukum pidana yang mengatur tindakan yang melanggar aturan dan memperbolehkan negara untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku.

Ada beberapa hal yang diatur oleh hukum perdata, di antaranya termasuk hak kepemilikan atas suatu barang atau aset, pembayaran utang, kontrak, perjanjian bisnis, status keluarga, pewarisan, dan tuntutan ganti rugi atas segala bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh seseorang atau suatu perusahaan.

Berdasarkan hukum perdata, individu memiliki hak untuk melakukan tuntutan hukum atas pengadilan. Hak ini diberikan untuk melindungi hak-hak individu dan memperkuat rasa keadilan dalam hubungan bisnis dan kehidupan sosial. Dalam suatu perseteruan, hakim akan membuat keputusan berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam hukum perdata.

Salah satu prinsip yang penting dalam hukum perdata adalah kebebasan beralih hak. Prinsip ini memperbolehkan individu atau suatu organisasi untuk memindahkan hak-hak yang dimilikinya pada pihak lain. Melalui proses pengalihan hak, individu atau organisasi dapat menjual atau memindahkan status kepemilikan dari suatu barang atau aset.

Hukum perdata juga mengatur tuntutan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan secara tidak sengaja atau salah satu pihak. Ketika terjadi suatu kerugian yang disebabkan oleh tindakan salah satu pihak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum untuk memperoleh ganti rugi.

Selain itu, hukum perdata juga berkaitan erat dengan hak pewarisan. Salah satu kewajiban bagi seseorang adalah menentukan pewaris atas hartanya. Hal ini memerlukan pembuatan wasiat atau pembagian harta secara adil antara ahli waris. Dalam hal ini, hukum perdata memainkan peran penting dalam penentuan bagian waris yang adil dan merata. (Simanjutak, 2015)

Berbicara tentang sumber hukum, maka di dalam ilmu hukum dikenal beberapa sumber hukum dalam arti formal, yaitu:

1. Undang-undang

2. Perjanjian (antarnegara)

3. Kebiasaan

4. Doktrin

5. Yurisprudensi

Berpijak dari sumber hukum di atas, maka dalam hukum acara perdata dikenal beberapa sumber hukum yang menjadi bahan acuan, bukan saja yang terbatas pada kategori sumber hukum di atas, tetapi dijumpai pula sumber hukum yang tidak dikenal dalam sumber hukum di atas, misalnya dikenal surat surat edaran Mahkamah Agung yang ternyata menjadi acuan bagi para hakim dalam memeriksa perkara. Oleh sebab itu, sumber hukum dalam hukum acara jauh lebih luas dari sumber hukum yang dikenal dalam ilmu hukum.

Sumber hukum acara perdata adalah tempat di mana dapat ditemukan peraturan hukum acara perdata yang berlaku di negara kita, yaitu:

* + - 1. ***Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR)**

HIR adalah hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura. Hukum acara perdata dalam HIR dituangkan pada Pasal 115-245 yang termuat dalam BAB IX, serta beberapa pasal yang tersebar antara Pasal 372-394. Pasal 115 s/d Pasal 117 HIR tidak berlaku lagi berhubung dihapus-nya Pengadilan Kabupaten oleh UU No.1 Darurat (Drt) Tahun 1951, dan peraturan mengenai banding dalam Pasal 188-194 HIR juga tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

* + - 1. ***Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.)**

*Reglement Op de Burgelijke Rechtsvordering* (Rv) adalah hukum perdata Eropa yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Tapi ternya-ta tidak cocok dengán Indonesia, oleh karena itu kemudian diadakan penyesuaian dan dibentuklah HIR. Kemudian setelah beberapa lama, terjadi ketidaksesuaian dengan daerah luar Jawa dan Madura, maka dibentuklah RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*). RBg adalah hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah-dae-rah luar Pulau Jawa dan Madura. RBg terdiri dari lima bab dan bab tu-juh ratus dua puluh tiga pasal yang mengatur tentang pengadilan pada umumnya, dan hukum acara pidananya tidak berlaku lagi dengan ada-nya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Ketentuan hukum acara perdata yang termuat dalam BAB II Title I, I, I, VI, dan VIl tidak berlaku lagi, yaig masih berlaku hingga sekarang adalah Title IV dan V bagi Landraad (sekarang Pengadilan Negeri).

* + - 1. ***Burgerlijk Wetboek* (BW)**

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU Darurat No. 1 Tahun 1951, maka hukum acara perdata pada pengadilan negeri dilakukan dengan mem-perhatikan ketentuan UU Darurat tersebut. Yang dimaksud oleh UU Darurat No. 1 Tahun 1951 tersebut adalah Het Herziene Indoneisch Re-glement (HIR) untuk daerah Jawa dan Madura, dan Rechtsreglement Buitengewesten (RB.) untuk luar Jawa dan Madura. Surat Edaran Mah-kamah Agung No.19 Tahun 1964 dan No. 3 Tahun 1965 me-negaskan berlakunya HIR, RB., RO atau Reglement tentang Organisasi Kehakiman S.1847 No. 23 dan BW Buku IV sebagai sumber daripada hukum acara perdata dan selebihnva terdanat tersebar dalam BW *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), mes-kipun sebagai kodifikasi hukum perdata materiel, namun juga memuat Hukum Acara Perdata, terutama dalam Buku IV tentang pembuktian dan kedaluwarsa (Pasal 1865-Pasal 1993), selain itu juga terdapat da-lam pasal Buku 1, misalnya tentang tempat tinggal atau domisili (Pasal 17-Pasal 25) serta beberapa pasal Buku Il dan Buku III (misalnya Pasal 533, 535, 1244, dan 1365).

* + - 1. **Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29**

Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29 ini memuat ketentuan Hukum Acara Perdata tentang kekuatan pembuktian tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia (bumiputra) atau dipersamakan dengan mereka. Pasal-pasal ordonasi ini diambil alih dalam penyusunan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.)

* + - 1. ***Wetboek van Koophandel* (WVK)**

*Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Dagang), meskipun juga sebagai kodifikasi Hukum Perdata Materiel, namun di dalamnya ada beberapa pasal yang memuat ketentuan Hukum Acara Perdata (Misalnya Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 255, 258, 272, 273, 274, dan 275).

* + - 1. **Yurisprudensi**

Beberapa yurisprudensi terutama dari Mahkamah Agung menjadi sumber Hukum Acara Perdata yang sangat penting di negara kita ini, terutama untuk mengisi kekosongan, kekurangan, dan ketidak sempurnaan yang banyak terdapat dalam peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata peninggalan Zaman Hindia Belanda. Menurut S.F. Andrea dalam *rechtgeleerdhand woordenboek*, yurisprudensi dapat berarti juga peradilan pada umumnya dan ajaran hukum yang diciptakan dan dipertahankan oleh peradilan

* + - 1. **Peraturan Mahkamah Agung**

Peraturan Mahkamah Agung juga merupakan sumber Hukum Acara Perdata. Dasar hukum bagi Mahkanah Agung untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung ini termuat dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

* + - 1. **Adat Kebiasaan**

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata, sebagai sumber daripada hukum acara perdata. Hukum acara perdata dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum perdata materiel, yang berarti mempertahankan tata hukum perdata, maka pada asasnya hukum acara perdata bersifat mengikat dan memaksa. Adat kebiasaan hakim yang tidak tertulis dalam melakukan pemeriksaan, dapat menjadi salah satu sumber hukum acara demi menjamin kepastian hukum.

* + - 1. **Doktrin**

Doktrin adalah ajaran atau pendapat para sarjana hukum terkemuka. Doktrin menjadi sumber hukum dikarenakan adanya pendapat umum yang menyatakan bahwa manusia tidak boleh menyimpang dari *Communis Opinion Doctorum* (pendapat umum para sarjana). Oleh karena itulah doktrin mempunyai kekuatan mengikat. Tetapi doktrin itu sendiri bukanlah hukum.

* + - 1. **Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung**

Saat ini telah banyak Surat Edaran dan Instruksi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang dijadikan pedoman dalam beracara oleh para hakim di Pengadilan. Meskipun dalam ilmu hukum bahwa Instruksi dan Surat Edaran tidak termasuk dalam salah satu sumber hukum dan tidak pula tercantum dalam sumber hukum yang ditentukan dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi dalam praktik Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung dijadikan salah satu rujukan oleh para hakim. (Asikin, 2012)

1. Karakteristik Hukum perdata

Hukum perdata merupakan salah satu cabang dari hukum yang memiliki karakteristik khusus. Berikut adalah ciri-ciri hukum perdata:

1. Berlaku untuk Hubungan Hukum Antar Individu

Ciri utama dari hukum perdata adalah berlakunya untuk hubungan hukum antar individu. Artinya, hukum perdata berlaku dalam kehidupan sehari-hari, antara individu dengan individu lain, atau antara individu dengan badan usaha. Contoh dari hubungan hukum perdata adalah jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian kerjasama.

1. Menjelaskan Hak dan Kewajiban

Hukum perdata menjelaskan hak dan kewajiban antar individu dalam hubungan hukum perdata tersebut. Sebagai contoh, dalam hubungan jual beli, penjual memiliki hak atas harga jual barang yang dibayarkan oleh pembeli, dan pembeli memiliki hak atas barang yang dibelinya. Sebaliknya, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan, dan pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga barang sesuai dengan kesepakatan.

1. Mengatur Tatacara Perdata

Tatacara perdata adalah suatu cara pengaturan mengenai cara-cara dan prosedur yang harus diikuti dalam mengatasi suatu perselisihan yang terjadi di antara para pihak dalam hukum perdata. Hukum perdata mengatur tatacara perdata agar perselisihan dalam hukum perdata dapat terselesaikan secara tepat dan efisien. Selain itu, tatacara perdata juga menjadi pedoman bagi para hakim dalam menjatuhkan keputusan. Tatacara perdata mengatur prosedur seperti pendaftaran gugatan, sidang, hingga proses eksekusi putusan hakim yang bersifat perdata. Tatacara perdata di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini mencakup pengaturan mengenai pembuktian, perbandingan, pemeriksaan saksi, pembacaan putusan dan lain-lain.

1. Menggunakan Hukum Acuan

Selain itu, ciri dari hukum perdata adalah penggunaan hukum acuan atau hukum yang menjadi acuan dalam penerapan hukum perdata di suatu negara. Di Indonesia, hukum acuan yang digunakan adalah KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. KUH Perdata menjadi landasan utama dalam penerapan hukum perdata di Indonesia. Selain itu, masih ada beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan lain-lain yang juga mengatur perspektif hukum perdata dalam bidang tertentu.

1. Putusan Hakim Bersifat Final

Putusan hakim dalam perkara hukum perdata bersifat final dan mengikat para pihak di dalamnya. Artinya, apabila sudah terdapat putusan hakim tentang suatu perkara perdata, maka putusan tersebut harus ditaati dan tidak dapat diganggu gugat kembali. Putusan hakim tersebut juga dapat dipakai sebagai dasar dalam tuntutan hukum eksekutif, artinya putusan hakim tersebut dapat dieksekusi oleh pihak yang berwenang seperti Pengadilan Negeri.

Itulah beberapa ciri utama dari hukum perdata. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjumpai berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hukum perdata. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami lebih dalam mengenai hukum perdata agar dapat menjalankan hubungan hukum perdata dengan lebih bijaksana dan adil.

1. Asas-Asas dan Unsur-Unsur Hukum Perdata

Hukum Perdata di Indonesia secara garis besar diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPDT) atau dikenal juga dengan istilah *Burgerlijk Wetboek* (BW). BW terdiri dari empat bagian, yaitu Buku I memuat hukum tentang orang, Buku II memuat hukum tentang benda, Buku III memuat hukum tentang perikatan, dan Buku IV memuat hukum tentang pembuktian dan daluwarsa. Dalam hukum perdata, berikut asas-asas yang lazim digunakan:

1. Asas yang melindungi hak-hak asasi manusia: tercantum dalam Pasal 1-3 BW
2. Asas bahwa setiap orang harus mempunyai nama dan tempat kediaman hukum (*domicile*): tercantum dalam Pasal 5a dan seterusnya BW
3. Asas perlindungan kepada orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsonbekwaam*): tercantum dalam Pasal 1330 BW Asas yang membagi hak manusia ke dalam hak kebendaan dan hak perorangan
4. Asas hak milik itu adalah fungsi sosial: bahwa orang tidak dibenarkan untuk membiarkan atau menggunakan hak miliknya secara merugikan orang atau masyarakat (lihat Pasal 1365 BW)
5. Asas pacta sunt servanda: setiap perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati dengan iktikad baik (lihat Pasal 1338 BW)
6. Asas kebebasan dalam membuat perjanjian dan persetujuan: sering juga dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, setiap orang bebas dalam membuat perjanjian bagaimana pun bentuk dan isinya dengan syarat tidak bertentangan dengan kesusilaan, tertib hukum, dan undang-undang yang berlaku. (Sabiila, 2024)
7. Sistematika Hukum Perdata

Sistematika hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua macam. yaitu sistematika menurut ilmu pengetahuan dan sistematika menurut KUHPerdata. Sistematika hukum perdata berdasarkan ilmu pengetahuan, yaitu:

(1) hukum tentang orang;

(2) hukum kekeluargaan;

(3) hukum harta kekayaan;

(4) hukum warisan. (Salim, 2019)

Pembentuk Undang-Undang, membuat sistematika KUH Perdata dalam 4 (empat) buku yaitu:

1. Perihal Orang (*van Personen*), memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga;

2. Perihal Benda (*van Zaken*), berisikan hukum tentang kebendaan dan hukum waris;

3. Perihal Perikatan (*van Verbintenissen*), memuat hukum kekayaan mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang / pihak tertentu;

4. Perihal Pembuktian dan Daluwarsa (*van Bewijs en Verjaring*), memuat hukum pembuktian dan akibat hukum dari lewat waktu terhadap hubungan hukum.

Berbeda halnya pandangan ilmu hukum melihat pembagian hukum perdata. Menurut ilmu hukum, hukum perdata dibagi dalam 4 ( empat ) bagian yakni:

1. Hukum Perorangan (*Personenrecht*), memuaat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, perihal kecakapan dan kewenangan hukum untuk bertindak, mengatur hak dan kewajiban dan hal-hal yang mempengaruhi kecakapan tersebut;

2. Hukum Kekeluargaan (*Familierecht*), memuat pengaturan tentang hubungan hukum yang lahir dari hubungan kekeluargaan yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum harta kekayaan antara suami dengan istri, hubungan antara orang tua dengan anak, perwalian dan kuratel;

3. Hukum Harta Kekayaan (*Vermogensrecht*), memuat pengaturan tentang hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang;

4. Hukum Waris (*Erfrecht*), memuat pengaturan tentang harta kekayaan seseorang setelah orang itu meninggal dunia atau mengatur akibat-akibat hukum hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

Dari dua jenis pembagian hukum perdata yang dipaparkan di atas, pada prinsipnya satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan namun dapat dibedakan. Perbedaan itu terletak kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam KUH Perdata, hukum kekeluargaan menjadi bagian atau dimasukkan ke dalam hukum perorangan, yang menurut ilmu hukum diatur secara tersendiri. Menurut pembentuk undang-undang, akan dimasukkannya hukum kekeluargaan tersebut ke dalam hukum perorangan, yang menurut ilmu hukum diatur secara tersendiri. Menurut pembentuk undang-undang, alasan dimasukkannya hukum kekeluargaan tersebut ke dalam hukum perorangan karena hubungan hukum yang diatur dalam hukum kekeluargaan sangat mempengaruhi terhadap kekuasaan atau kewenangan bertindak dari seseorang.

2. Dalam KUH Perdata, hukum waris dimasukkan atau menjadi bagian dari hukum benda, yang menurut ilmu hukum diatur secara tersendiri. Menurut pembentuk undang-undang, alasan dimasukkannya hukum waris ke dalam hukum benda karena dianggap hukum waris itu mengatur cara-cara untuk memperoleh ha katas benda, yaitu benda yang ditinggalkan seseorangan disebabkan meninggal dunia. Pendapat lain mengatakan kurang tepat apabila hukum waris dimasukkan ke dalam hukum benda karena hak atas kebendaan yang diterima ahli waris hanya merupakan kelanjutan dari yang meninggal dunia dan bukan memperoleh hak kebendaan baru.

3. Dalam KUH Perdata juga dimuat tentang hukum pembuktian dan daluwarsa. Meletakkan hal tersebut 4 dalam buku IV kurang tepat karena hukum pembuktian merupakan hukum acara / hukum formil, sedangkan KUH Perdata adalah hukum materil. Ada sebahagian berpendapat bahwa hukum acara dapat dibagi 2 (dua) yakni hukum acara formil dan hukum acara materil. Persoalan mengenai alat-alat pembuktian adalah bagian dari hukum acara materil yang tentunya dapat juga diatur dalam hukum perdata materil.

Sistematika hukum perdata menurut pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

Buku I : tentang Orang

Buku II : tentang Hukum Benda.

Buku III : tentang Perikatan.

Buku IV: tentang Pembuktian dan Daluwarsa

Bidang hukum orang dan hukum keluarga dalam sistematika ilmu pengetahuan diatur dalam Buku I menurut sistematika pembentuk undang-undang, hukum harta kekayaan dalam sistematika ilmu pengetanuan diatur dalam Buku II dan Buku III , sedangkan huk waris ada dalam Buku II. (Meliala, 2014)

Berdasarkan sistematisasi dalam KUH Perdata terlihat, bahwa Hukum Keluarga dimasukkan dalam bagian hukum tentang diri seseorang, karena hubungan-hubungan keluarga memang berpengaruh besar terhadap keakapan seseorang untuk memiliki hak-hak serta kecakapan untuk menggunakan hak-haknya itu. Hukum waris, dimasukkan dalam bagian tentang hukum perbendaan, ka-rena dianggap hukum waris itu mengatur cara-cara untuk mem-peroleh hak atas benda-benda yang ditinggalkan seseorang.

Perihal pembuktian dan lewat waktu [daluarsa] sebenarnya adalah soal hukum acara, sehingga kurang tepar dimasukkan dalam KUH Perdata yang pada dasarnya mengatur hukum perdata materil. Terapi beberapa ahli berpendapat, bahwa hukum acara itu dapat dibagi dalam bagian materiil dan bagian formil. Soal-soal yang mengenai alat-alat pembuktian terhitung bagian yang termasuk hukum acara materiil yang dapat diatur juga dalam suatu undang-undang tentang hukum perdata materil. (Tutik, 2008)

Berkaitan dengan hal tersebut dilihat dari segi isi masing-masing buku dalam KUH Perdata, maka subtansi KUH Perdata ter-bagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

(1) Buku I, Il dan III berisi ketentuan-ketentuan hukum perdata materill; dan

(2) Buku IV, berisi ketentuan-ketentuan hukum perdata formil.

Menurut Hartono Hadisoeprapto, pembidangan lapangan hu-kum perdata di Indonesia menjadi berbagai bidang yang variatif, selain dari segi ilmu pengetahuan hukum dan dari segi sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) juga dari segi per-kembangannya. (Hadisoeprapto, 1982)

Ditinjau dari segi perkembangannya hukum perdata di Indonesia sekarang menunjukkan tendensi perubahan. Sebagaimana sistematika hukum perdata Belanda yang diundangkan pada tanggal 3 Desember 1987 Stb. 590 dan mulai berlaku 1 April 1988 me-liputi lima buku, yaitu:

(1) Buku I tentang Hukum Orang dan Keluarga (*Personenen Famili Erecht*);

(2) Buku Il tentang Hukum Badan Hukum (*Rechtspersoon*);

(3) Buku Ill tentang Hukum Hak Kebendaan (*Van Zaken*);

(4) Buku IV tentang Hukum Perikatan (*Van Verbintennissen*);

(5) Buku V tentang Daluarsa (*Van Verjaring*). (Salim H. , 2019)

Sedangkan dilihat dari segi pembidangan isinya hukum perdata Indonesia dalam perkembanganya terbagi menjadi bagian-bagian antara lain:

(1) Bidang Hukum Keluarga, yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hu-bungan hukum mengenai perkawinan, perceraian, harta ben-da dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, kedudukan, pe-ngampuan dan perwalian;

(2) Bidang Hukum Waris, yaitu hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, ter-utama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain;

(3) Bidang Hukum Benda, yaitu peraturan-peraturan bukum yang mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak artinya hak terhadap benda yang oleh setiap orang wajib diakui dan dihormati;

(4) Bidang Hukum Jaminan, yaitu peraturan-peraturan huku? yang mengatur tentang pembebanan jaminan terhadap benda (jaminan kebendaan) dan perorangan (jaminan perorangan);

(5) Bidang Hukum Badan Hukum, yaitu peraturan-peraturan hu-kum yang mengatur tentang harta kekayaan, hak dan kewa-jiban suatu badan hukum;

(6) Bidang Hukum Perikatan Umum, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur perhubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih di mana pihak pertama berhak atas sesuatu prestasi;

(7) Bidang Hukum Perjanjian Khusus, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur perhubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih di mana pihak pertama berhak atas sesuatu prestasi untuk hal-hal khusus. Misanya jual beli, sewa menyewa, dan lain-lai

Adapun beberapa asas-asas hukum acara perdata lainya yang biasa digunakan, yaitu:

* 1. Hakim bersifat menunggu

Hakim bersifat menunggumaksudnya ialah hakim bersifat me-nunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya, kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan maka tidak ada hakim. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan (Pasal 118 HIR, 142 RBg.). Asas dari hukum acara perdata pada umumnya ialah bahwa pelak-sanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka hakim tidak bekerja atau hakim tidak ada. Demikianlah bunyi pemeo yang tidak asing lagi (*wo kein klager ist, ist kein reichter, nemo judex sine actore*). Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah hak yang berke-pentingan, sedang hakim menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya "*index ne procedat ex officio*". Hanya yang menyelenggarakan proses adalah negara. Akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadil. dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

* 1. Hakim Pasif

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dala arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asanya ditentukan oleh para pihak yang beperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan (Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Ta-hun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak (*secendum allegata iudicare*). Hanya peristiwa yang disengketakan sajalah yang harus dibuktikan. Hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak. Para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan dan bu-kan hakim. Asas ini disebut verhandlungsmaxime. Jadi pegertian pasif ini yaitu bahwa hakim tidak menentukan luas daripada pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Akan tetapi itu semuanya tidak berarti bahwa hakim tidak aktif sama sekali tidak aktif. Selaku pimpinan sidang harus aktif memimpin dan memeriksa perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekadar alat daripada para pihak, dan haruslah berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Karenanya dikatakan bahwa sistem HIR adalah aktif, berbeda dengan sistem Rv yang pada pokoknya mengandung prinsip "hakim pasif". Asas hakim menurut HIR itu sesuai dengan aliran pikiran tradisional Indonesia.

* 1. Sifatnya Terbuka Persidangan

Sidang pemeriksaan di pengadilan pada asanya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuannya ialah untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair (Pasal 19 ayat (1) dan 20 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Apabila tidak dibuka untuk umum maka putusan tidak sah dan batal demi hukum. Sidang pemeriksaan pengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk umum juga dimaknai bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan daripada asas ini tidak lain untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia da-lam peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggung jawabkan yang fair, tidak memihak serta purusan yang adil kepada masyarakat. Asas ini dapat kita jumpai pada Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain." Secara formal asas ini membuka kesempatan untuk "sosial kon-trol". Asas terbukanya persidangan tidak mempunyai arti bagi acara yang berlangsung secara tertulis. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting yang dimuat di dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dilakukan dengan pintu tertutup.

* 1. Mendengar Kedua Belah Pihak (Penggugat dan Tergugat Melalui Surat- surat)

Dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang beperkara harus sama-sama diperhatkan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Di dalam hukum acara perdata kedua belah pihak diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Pengadilan meng-adili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang beperkara harus sama-sama diperhatikan atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapainya. Asas kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas "*audi et alterampartem*" atau "*eines mannes redeist keines mannes rede, man soll sie loren alle beide"*. Bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.

* 1. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

Semua putusan pegadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 184 ayat (1), 319 HIR, 618 RBg.). Alasan-alasan atau argu-mentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim daripada putusanya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunya nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan itulah, maka putusan yang mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkanya. Hal yang sama dijumpai dalam Pasal 50 (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menentukan "Putusan pengadilan selain harus memuat ala-san dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Mahkamah Agung juga dalam berbagai putusannya menggariskan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertanggung-jawabkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan. Kenyataannya sekarang tidak sedikit hakim yang terikat oleh putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung mengenai perkara yang sejenis. Bukan karena kita mengikuti asas "*the binding force of precedent*", melainkan terikatnya hakim itu karena yakin bahwa putusan yang mengenai perkara yang sejenis itu meyakinkan putusan itu tepat. Imu pengetahuan hukum merupakan sumber pula untuk mendapatkan bahan guna mempertanggungjawabkan putusan hakim di dalam mempertimbangakannya. Sifat objektif daripada ilmu pengetahuan itu sendiri menyebabkan putusan hakim yang bernilai objektif pula.

* 1. Beracara Dikenakan Biaya

Untuk beperkara-pada asanya dikenakan biaya (Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 121 ayal (4), 182,183 HIR; serta Pasal 145 ayat (4), 192-194 RBg.). Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Biaya tersebut juga dikeluarkan untuk pengacara atas bantuan yang dimintakan kepadanya. Namun bagi yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara Cuma-cuma (*pro deo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi (Pasal 23 HIR, 273 RBg).

* 1. Tidak Ada Keharusan Mewakilkan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan perkaranya kepada orang lain, sehingga pemerikasaan terjadi secara langsung ter-hadap pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi, para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya. Dengan demikian, hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa. Wewenang untuk memyajukan gugatan dengan lisan tidak berlaku bagi kuasa. Dengan memeriksa para pihak yang berkepentingan secara langsung hakim dapat mengetahur lebih jelas persoalannya. Walaupun HIR menentukan, bahwa para pihak dapat dibantu atau diwakili, akan tetapi tidak ada ketentuan bahwa seorang pembantu atau diwakil harus seorang ahli atau sarjana hukum.

Persyaratanya untuk bertindak sebagai prosedur. Antara lain ia harus sarjana hukum (Pasal 186). Pada hakikatnya tujuan daripada perwakilan wajib oleh sarjana hukum (*verplichte procureurstel ling*) ini tidak lain untuk lebih menjamin pemeriksaan yang objektif, melancarkan jalannya peradilan dan memperoleh putusan yang adil. Adapun mengenai terjadinya perwakilan, antara lain:

a. Ketentuan undang-undang, misalnya untuk anak di bawah umur oleh orangtua atau wali, sakit ingatan oleh pengampunya.

b. Perjanjian kuasa khusus, untuk perwakilan yang dilakukan oleh pengacara atau penasihat hukum.

c. Tanpa surat kuasa khusus, untuk acara gugatan perwakilan kelom-pok oleh satu atau beberapa orang dari kelompoknya (Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok).

Perlu diketahui bahwa wewenang untuk mengajukan gugatan secara lisan tidak berlaku bagi Penerima Kuasa. Selanjutnya peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). Maksudnya adalah hakim harus selalu insyaf karena sumpah jabatannya, ia tidak hanya ber-tanggung jawab kepada hukum, diri sendiri dan kepada masyarakat, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap putusan pengadilan harus mencantumkan klausa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" agar putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk melaksanakan putusan secara paksa apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melak-sanakan putusan dengan sukarela.

* 1. Peradilan Dilakukan dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009)

Sederhana, maksudnya acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas dalam beracara maka semakin baik. Sebaliknya terlalu banyak formalitas atau peraturan akan sulit dipahami dan akan menimbulkan beraneka ragam penafsiran sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum. Cepat menunjuk jalannya peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya tidak berlarut-larut yang terkadang harus dilanjutkan oleh ahli warisnya. Biaya ringan maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Biaya perkara yang tinggi membuat orang enggan beracara di pengadilan.